

COVER DEPAN

Daftar Isi

DAFTAR TABEL

**PERNYATAAN
TANGGUNG JAWAB**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

NERACA

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

BAB I **PENDAHULUAN**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran (LRA)*, *Neraca*, *Laporan Operasional (LO)*, *Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)* dan *Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)*.

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 antara lain merupakan sarana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan selama TA 2023 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD TA. 2021;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023;
16. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
17. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900/16598-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Awal Tahun Anggaran 2024 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTIAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya¹, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 3,46. Tingkat inflasi ini sedikit melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya sebesar 2,61. Faktor penahan inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh adanya normalisasi permintaan, khususnya pada komoditas pangan dan konsumsi setelah mengalami peningkatan paska momentum HBKN (Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional) seperti sebelumnya. Meredanya tekanan inflasi dari kelompok transportasi, khususnya angkutan udara, sebagai kelompok penyumbang inflasi tertinggi. Keadaan ekonomi makro ini cukup membebani kinerja SKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai representatif dari pengaplikasian misi-misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan visinya.

Ekonomi makro yang kurang menguntungkan ini dapat berkorelasi negatif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga tetap berupaya agar terwujudnya visi dan misi pemerintah, hal ini berimplikasi pula dengan adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 65.574.873.710,00 dari anggaran murninya yaitu sebesar Rp 557.731.625.687,00 atau sebesar 11,75%. Anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat dan menunjang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target. Adapun perubahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut:

¹ <https://kaltim.bps.go.id/indicator/3/147/1/inflasi.html>

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2023

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	279.262.240.433	2.265.474.159	281.527.714.592
1.1	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>1.813.200.000</i>	<i>363.836.000</i>	<i>2.177.036.000</i>
1.1	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	917.800.000	(100.200.000)	817.600.000
1.1	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	895.400.000	464.036.000	1.359.436.000
1.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>151.148.620.706</i>	<i>(45.489.474.519)</i>	<i>105.659.146.187</i>
1.1	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	146.354.149.706	(45.609.354.519)	100.744.795.187
1.1	02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.467.700.000	119.880.000	3.587.580.000
1.1	02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	126.360.000	0	126.360.000
1.1	02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.033.097.700	0	1.033.097.700
1.1	02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	167.313.300	0	167.313.300
1.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>973.293.100</i>	<i>51.000.000</i>	<i>1.024.293.100</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.1	03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21.513.300	0	21.513.300
1.1	03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	292.765.000	0	292.765.000
1.1	03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	339.148.800	51.000.000	390.148.800
1.1	03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	319.866.000	0	319.866.000
1.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.140.349.500	286.006.500	4.426.356.000
1.1	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.769.244.900	29.970.000	1.799.214.900
1.1	05	4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	321.648.000	0	321.648.000
1.1	05	5	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	81.947.500	125.902.500	207.850.000
1.1	05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.725.484.800	130.134.000	1.855.618.800
1.1	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	242.024.300	0	242.024.300
1.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	14.870.932.173	5.439.554.367	20.310.486.540
1.1	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	183.550.165	5.082.400	188.632.565
1.1	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	1.713.533.034	2.086.027.150	3.799.560.184

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Kantor			
1.1	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	546.564.830	0	546.564.830
1.1	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.389.985	60.660.000	319.049.985
1.1	06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	462.342.359	10.752.033	473.094.392
1.1	06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.331.200	0	21.331.200
1.1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.482.493.100	3.095.151.500	14.577.644.600
1.1	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55.942.500	0	55.942.500
1.1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	146.785.000	181.881.284	328.666.284
1.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	74.056.473.940	37.009.200.284	111.065.674.224
1.1	07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	523.750.000	0	523.750.000
1.1	07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.850.245.500	25.002.800.392	73.853.045.892
1.1	07	5	Pengadaan Mebel	668.153.700	148.724.000	816.877.700
1.1	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.006.244.740	9.827.467.992	32.833.712.732
1.1	07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	36.000.000	0	36.000.000
1.1	07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	217.164.000	0	217.164.000
1.1	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	306.830.000	0	306.830.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Bangunan Lainnya			
1.1	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	448.086.000	2.030.207.900	2.478.293.900
1.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	21.537.028.314	1.299.687.047	22.836.715.361
1.1	08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.350.800	0	78.350.800
1.1	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.476.553.476	311.261.900	3.787.815.376
1.1	08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	256.185.500	0	256.185.500
1.1	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.725.938.538	988.425.147	18.714.363.685
1.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	10.722.342.700	3.305.664.480	14.028.007.180
1.1	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	436.746.300	0	436.746.300
1.1	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.904.521.500	394.018.200	6.298.539.700
1.1	09	5	Pemeliharaan Mebel	20.250.000	0	20.250.000
1.1	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	957.590.900	135.835.000	1.093.425.900

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
1.1	09	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	759.609.100	2.228.059.980	2.987.669.080
1.1	09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	576.398.200	298.909.200	875.307.400
1.1	09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.067.226.700	248.842.100	2.316.068.800
3.1			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	211.282.101.422	35.468.760.550	246.750.861.972
<i>3.1</i>	<i>01</i>		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>63.489.094.533</i>	<i>3.031.018.650</i>	<i>66.520.113.183</i>
3.1	01	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	222.069.000	0	222.069.000
3.1	01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	2.050.260.100	0	2.050.260.100
3.1	01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	61.216.765.433	3.031.018.650	64.247.784.083
<i>3.1</i>	<i>02</i>		<i>Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan</i>	<i>8.331.256.150</i>	<i>450.228.000</i>	<i>8.781.484.150</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Konservasi (KPHK)			
3.1	02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.331.256.150	450.228.000	8.781.484.150
3.1	03		Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	15.908.903.200	6.608.897.600	22.517.800.800
3.1	03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3.257.927.700	0	3.257.927.700
3.1	03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.337.935.200	0	1.337.935.200
3.1	03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	6.358.438.000	5.494.747.600	11.853.185.600
3.1	03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	552.785.000	750.000.000	1.302.785.000
3.1	03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	2.851.796.000	0	2.851.796.000
3.1	03	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	485.049.000	0	485.049.000
3.1	03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1.064.972.300	364.150.000	1.429.122.300

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
3.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	60.664.100.971	13.703.942.400	74.368.043.371
3.1	04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1.226.662.370	71.900.000	1.298.562.370
3.1	04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.567.469.000	400.000.000	1.967.469.000
3.1	04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	51.478.711.600	13.232.042.400	64.710.754.000
3.1	04	5	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.165.397.000	0	1.165.397.000
3.1	04	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	5.225.861.001	5.225.861.001
3.1	04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	5.225.861.001	54.822.019.687	60.047.880.688
3.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	47.742.596.788	(47.091.147.288)	651.449.500
3.1	05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	651.449.500	4.156.281.200	4.807.730.700
3.1	05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	4.116.645.800	(3.305.670.800)	810.975.000
3.1	05	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil	810.975.000	14.038.297.636	14.849.272.636

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Hutan			
3.1	05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	11.352.272.636	27.576.180.216	38.928.452.852
3.1	05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	30.811.253.852	(24.735.785.552)	6.075.468.300
3.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	6.856.078.300	(6.627.802.000)	228.276.300
3.1	06	1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	228.276.300	5.618.915.700	5.847.192.000
3.1	06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	6.627.802.000	(4.248.570.000)	2.379.232.000
3.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	2.379.232.000	(1.604.642.000)	774.590.000
3.1	07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	774.590.000	158.092.000	932.682.000
3.1	07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	932.682.000	(260.722.000)	671.960.000
3.1	07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha	671.960.000	5.388.879.480	6.060.839.480

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara			
3.1	09		Perbenihan Tanaman Hutan	5.910.839.480	(1.690.236.680)	4.220.602.800
3.1	09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	4.070.602.800	(3.328.175.120)	742.427.680
3.1	09	2	Sertifikasi Sumber Benih	742.427.680	355.381.320	1.097.809.000
3.1	09	5	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	1.097.809.000	11.902.102.900	12.999.911.900
4.1			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	12.649.911.900	(1.745.180.100)	10.904.731.800
4.1	01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	10.554.731.800	(8.732.286.600)	1.822.445.200
4.1	01	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	1.822.445.200	139.586.800	1.962.032.000
4.1	01	2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1.793.295.000	(1.565.606.400)	227.688.600
4.1	01	3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	227.688.600	5.628.339.400	5.856.028.000
4.1	01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai	5.856.028.000	(4.996.490.000)	859.538.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi			
4.1	01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi	678.275.000	(501.275.000)	177.000.000
4.1	01	9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	177.000.000	(77.000.000)	100.000.000
4.1	02		<i>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</i>	100.000.000	0	100.000.000
4.1	02	1	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000	1.895.180.100	1.995.180.100
4.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	1.995.180.100	(1.895.180.100)	100.000.000
4.1	03	3	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	0	1.127.300.000	1.127.300.000
4.1	03	4	Pengendalian Kerusakan dan	100.000.000	667.880.100	767.880.100

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah			
4.1	03	5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	1.127.300.000	77.322.435.933	78.449.735.933
4.1	03	6	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	767.880.100	77.681.855.833	78.449.735.933
5.1			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	50.959.096.932	(29.440.291.476)	21.518.805.456
5.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	50.959.096.932	(37.885.400.621)	13.073.696.311
5.1	01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	21.518.805.456	22.338.428.710	43.857.234.166
5.1	01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	7.969.530.740	(4.391.255.740)	3.578.275.000
5.1	01	3	Penyiapan dan Pengembangan	21.470.760.736	(17.892.485.736)	3.578.275.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Perhutanan Sosial			
6.1			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.578.275.000	(3.085.578.000)	492.697.000
<i>6.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>3.578.275.000</i>	<i>(1.771.555.000)</i>	<i>1.806.720.000</i>
6.1	01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	492.697.000	609.542.600	1.102.239.600
6.1	01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.806.720.000	(1.630.101.600)	176.618.400
6.1	01	4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.102.239.600	(1.102.239.600)	0
6.1	01	6	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	176.618.400	(176.618.400)	0

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas didasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan memiliki 5 program dan 21 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Hutan
 - Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan
 3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai

tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah sebesar Rp 168.100.000 , nilai ini melebihi target yaitu sebesar Rp 54.350.000 dari target Rp 113.750.000 atau memperoleh 147,78 % dari target. Bila dibandingkan, maka dapat diketahui terjadi kenaikan sebesar Rp 117.450.000 atau sebesar 231,88 % dari realisasi pendapatan tahun lalu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah sebesar Rp 544.173.947.666, nilai ini tidak mencapai target sebesar Rp 79.132.551.731 dari nilai target sebesar Rp 623.306.499.397 atau hanya tercapai sebesar 87,30 % dari target. Bila dibandingkan, maka dapat diketahui terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp 298.892.714.467 atau sebesar 121,86 % dari realisasi belanja tahun lalu. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
<i>Dinas Kehutanan</i>					
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	210.146.720.482	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan 84 %
01.1	01		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	2.177.036.000	<i>Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i> 70 Nilai AKIP
01.1	01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	817.600.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	01	007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.359.436.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	102.501.960.187	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.744.795.187	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 orang /bulan
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	786.900.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
01.1	02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	970.265.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
001.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	612.631.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	03	004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	292.765.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 laporan
01.1	03	006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	319.866.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	867.750.000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	488.966.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	366 paket
01.1	05	005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	207.850.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen
01.1	05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	170.934.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.276.802.191	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.983.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	113.036.007	Jumlah Paket Peralatan dan	60 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	165.956.600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	120.200.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.635.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.461.382.100	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	06	010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55.942.500	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
01.1	06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	328.666.284	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>95.847.515.284</i>	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i>	<i>376 unit</i>
001.1	07	001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	523.750.000	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit
001.1	07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.853.045.892	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	88 unit
001.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.470.719.392	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>3.739.632.520</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.956.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	803.327.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.028.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.685.320.520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.123.393.300	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	39 unit
01.1	09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	130.462.800	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	654.422.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.950.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 unit
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	188.557.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	45.380.172.281	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.050.000 M3 dan 800 Ton
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	714.852.000	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	2 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	714.852.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	9.519.532.000	<i>Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung</i>	1611386,43 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	785.000.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 dokumen
03.1	03	002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	239.000.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	5.643.736.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBP dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 laporan
03.1	03	006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	2.851.796.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	16.460.429.001	<i>Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	475 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	534.760.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 dokumen
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	12.253.242.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha
03.1	04	005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.165.397.000	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2.507.030.001	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	12.763.104.800	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	6 kasus
03.1	05	003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	810.975.000	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 operasi
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3.814.593.020	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	8.137.536.780	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 laporan
03.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	2.220.630.000	<i>Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen</i>	13 unit manajemen
03.1	07	001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	774.590.000	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK)	48 unit manajemen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Skala Usaha Kecil dan Menengah	
03.1	07	002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	774.080.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 dokumen
03.1	07	003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	671.960.000	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 unit manajemen
03.1	09		Perbenihan Tanaman Hutan	3.701.624.480	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap; Sertf; Unit Usaha
03.1	09	001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1.861.387.800	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha, Laporan
03.1	09	002	Sertifikasi Sumber Benih	742.427.680	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 sertifikat
03.1	09	005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	1.097.809.000	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	95 Laporan, Unit Usaha
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.895.180.100	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0 %
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	1.895.180.100	<i>Luas KBEP yang dikelola</i>	6000 Ha
04.1	03	005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di	1.127.300.000	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			
04.1	03	006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	767.880.100	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6000 Ha
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	31.406.166.792	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
<i>05.01</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>31.406.166.792</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>15 laporan</i>
05.01	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	18.196.984.542	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 orang
05.01	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.691.518.200	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 kelompok
05.01	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	11.517.664.050	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha
06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2.178.275.000	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	14 %
<i>06.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>2.178.275.000</i>	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS</i>	<i>17 laporan</i>
06.1	01	001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	492.697.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 dokumen
06.1	01	002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	406.720.000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 dokumen
06.1	01	004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.102.239.600	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat	200 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	
06.1	01	006	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	176.618.400	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 laporan
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.951.019.016	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>153.690.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	153.690.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>260.925.300</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	102.525.300	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	158.400.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>423.461.096</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.426.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.747.400	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.024.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.959.696	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	289.425.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			SKPD		SKPD	
<i>01.1</i>	<i>07</i>		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>2.147.808.100</i>	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i>	<i>14 unit</i>
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.147.808.100	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	319 unit
<i>01.1</i>	<i>08</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.033.090.820</i>	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	203.590.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	829.500.320	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
<i>01.1</i>	<i>09</i>		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>1.932.043.700</i>	<i>Jumlah Unit barang yang diperlihara</i>	<i>85 unit</i>
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	496.271.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.241.200	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit
01.1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.387.531.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	580.609.000	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
<i>03.1</i>	<i>02</i>		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>580.609.000</i>	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	580.609.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	10.904.731.800	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			EKOSISTEMNYA			
04.1	01		<i>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</i>	10.904.731.800	<i>Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola</i>	64864 Ha
04.1	01	001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	1.822.445.200	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	5 laporan
04.1	01	002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	1.962.032.000	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 operasi
04.1	01	003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	227.688.600	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	64914,98 Ha
04.1	01	005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	5.856.028.000	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha
04.1	01	008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	859.538.000	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 desa
04.1	01	009	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	177.000.000	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 laporan
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	0	<i>Luas KBEP yang dikelola</i>	972,21 Ha
04.01	03	004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	0	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.064.384.800	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	2.064.384.800	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kehutanan</i>	8 laporan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	640.252.100	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.424.132.700	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.039.136.820	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>135.120.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.120.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>106.657.000</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.048.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	81.609.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>576.951.700</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.127.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	102.828.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.995.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
<i>01.1</i>	<i>07</i>		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>971.573.200</i>	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i>	<i>14 Unit</i>
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	935.573.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
01.1	07	008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	36.000.000	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	596.655.120	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.008.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.076.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	437.569.920	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	652.179.800	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	<i>30 unit</i>
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	147.664.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	46.460.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit
01.1	09	009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
01.1	09	011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	434.055.500	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	12.929.693.600	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	6.492.348.600	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>3 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6.492.348.600	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 unit
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	692.750.000	<i>Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung</i>	<i>110790 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi	692.750.000	Jumlah Dokumen Hasil	12 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3.425.393.400	<i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</i>	<i>100 Ha</i>
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.270.159.400	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	288.720.000,00	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	2.319.201.600	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>3 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	230.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	833.371.800	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.255.829.800	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.338.236.900	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	2.338.236.900	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>2 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	101.499.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani	743.508.600	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti	3 KTH/KUPS

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Hutan		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.493.229.300	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.758.848.298	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>158.520.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	158.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>125.022.500</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.800.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (100 stell)	2 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.222.500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.024.951.198</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.006.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.415.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	58.790.498	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.500.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	797.300.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	54 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					SKPD	
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.040.598.500	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.455.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.456.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	790.686.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	740.611.100	Jumlah Unit barang yang dipelihara	29 Unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	427.950.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.329.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	277.332.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.118.046.500	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.604.000.000	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	5 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.604.000.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	395.000.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	395.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Tersusun	
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	1.478.633.500	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>93859 Ha</i>
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	811.633.500	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	667.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 dokumen
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	3.655.013.000	<i>Jumlah Tindak Pidana yang ditangani</i>	<i>6 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	685.200.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	100.800.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.869.013.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 laporan
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	2.916.400.000	<i>Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen</i>	<i>1 unit</i>
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2.916.400.000	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 unit manajemen
03.1	09		<i>Perbenihan Tanaman Hutan</i>	1.069.000.000	<i>Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar</i>	<i>1 unit</i>
03.1	09	001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1.069.000.000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran	3 unit usaha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Benih dan Bibit Dalam Provinsi	
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.477.138.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>1.477.138.000</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>4 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	620.991.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	856.147.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.153.792.732	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>129.000.000</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>73.299.800</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	73.299.800	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>1.124.468.032</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.509.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.01	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.241.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
01.01	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.693.232	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket
01.01	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan	3.884.300	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Penggandaan		dan Penggandaan yang Disediakan	
01.01	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.038.140.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	619.139.300	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i>	6 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	619.139.300	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	680.353.000	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.226.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	122.607.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.519.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	527.532.600	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	77 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.402.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.130.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit
03			<i>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</i>	14.908.227.350	<i>Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)</i>	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	2.535.904.900	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	2.535.904.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan	19 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Operasionalisasi KPH		Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	921.892.650	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	921.892.650	Jumlah Dokumen yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	953.416.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	244.416.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	709.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 dokumen
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	-	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5.768.825.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5.768.825.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha
03.1	04	006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	0	Luas areal Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	3 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.796.984.800	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	284.400.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	452 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan	792.584.800	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi,	4 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Hutan		Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.720.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	699.677.200	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
<i>05.1</i>	<i>05</i>		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>699.677.200</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>10 laporan</i>
05.1	05	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	-	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 orang
05.1	05	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	699.677.200	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	8.042.219.632	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>139.200.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>140.758.500</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.736.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	22.200.000	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 laporan
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.200.000	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN
01.1	05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54.622.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.002.458.112	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.860.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	133.556.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.734.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.116.312	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	823.251.500	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	3.490.915.900	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i>	<i>60 unit</i>
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	179.914.800	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.311.001.100	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 paket
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.152.774.520	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	243.712.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	909.061.920	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.116.112.600	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	<i>41 unit</i>
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.938.300	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.360.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit
01.1	09	009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.765.814.300	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.840.575.992	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	4.779.144.322	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.779.144.322	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	356.006.200	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	356.006.200	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	488.643.000	<i>Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung</i>	<i>137495 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	124.493.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	364.150.000	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 laporan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.925.020.170	<i>Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara</i>	<i>50 Ha</i>
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	61.191.170	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.408.154.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	455.675.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>1.420.730.000</i>	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	405.048.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	815.682.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 laporan
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	<i>871.032.300</i>	<i>Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu</i>	<i>1 Unit</i>
03.1	06	001	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	228.276.300	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	642.756.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 unit manajemen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.560.561.358	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>1.560.561.358</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>10 laporan</i>
05.1	01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	105.156.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 orang
05.1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani	481.162.365	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi	10 KTH

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Hutan			
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	974.242.993	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	20 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.916.749.114	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>155.520.000</i>	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	155.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>292.770.000</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	69.180.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	223.590.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang
<i>01.1</i>	<i>06</i>		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>974.220.354</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.857.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	137.405.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.300.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.697.054	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	777.960.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan
<i>01.1</i>	<i>08</i>		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>921.570.360</i>	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 bulan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.198.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	803.372.160	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	572.668.400	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	2 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	373.367.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	113 unit
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.301.200	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13.094.643.100	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	6.729.677.500	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	1 dokumen
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 unit
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6.729.677.500	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	164 unit
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	130.020.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	267.068 Ha
03.1	03	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	130.020.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3.139.519.100	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	57 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.767.531.600	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	371.987.500	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	3.095.426.500	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	239.520.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267.068 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	631.472.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.224.434.500	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	51 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.657.611.500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	1.657.611.500	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	10 laporan
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.657.611.500	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.986 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.673.615.426	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	141.240.000	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	12 laporan
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	68.395.500	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	68.395.500	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	231.558.000	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	132.258.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.300.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	557.055.606	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.441.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.267.206	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.706.600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	41.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	374.640.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.064.332.320	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	109.994.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
01.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	954.337.920	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	611.034.000	<i>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	15 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	354.774.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	136.260.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 unit
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.000.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.964.547.900	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	3.073.146.400	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.073.146.400	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	297.250.000	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	297.250.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	571.520.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	272.566 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	194.340.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	377.180.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	03	006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	-	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	1.663.372.200	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	100 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	120.471.200	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.542.901.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	-	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	3.603.643.300	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	211.160.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997.384,08 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	528.370.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.864.113.300	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 laporan
03.1	09		<i>Perbenihan Tanaman Hutan</i>	755.616.000	<i>Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar</i>	1 Lap; Sertf; Unit Usaha
03.1	09	001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	755.616.000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran	3 unit usaha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Benih dan Bibit Dalam Provinsi	
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.407.502.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>2.407.502.000</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>3 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	206.595.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	594.838.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.606.069.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.756.010.477	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>139.200.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>198.500.000</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	198.500.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>750.003.637</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.050.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.580.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket
01.1	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.169.337	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	613.204.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	414.535.600	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, dll</i>	1 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	414.535.600	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	828.061.040	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	247.039.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.021.440	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	425.710.200	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	33 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	368.789.600	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	33 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.920.600	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	53 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.529.208.936	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	2.058.678.736	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.058.678.736	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	404.225.500	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	404.225.500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	400.000.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>641.969 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	400.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	5.504.332.000	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>400 Ha</i>
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.504.332.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	346 Ha
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	3.161.972.700	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	495.345.500	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10.000 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	518.600.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.148.027.200	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.132.038.264	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	2.132.038.264	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>8 kegiatan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	230.105.964	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.167.913.300	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	734.019.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.645.838.316	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>189.106.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	129.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan
01.1	02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.832.700	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
01.1	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.673.300	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan
<i>01.1</i>	<i>03</i>		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>38.586.600</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	03	003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	21.513.300	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 laporan
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	17.073.300	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>136.442.200</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>1 laporan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	80.232.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	26.280.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 laporan
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.461.900	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang
01.1	05	011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16.467.800	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	521.458.116	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.354.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	86.240.016	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.363.500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.804.600	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	406.696.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 laporan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.212.365.700	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.610.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.037.755.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	455.148.300	Jumlah Unit barang yang dipelihara	25 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	360.785.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit
01.1	09	005	Pemeliharaan Mebel	20.250.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.612.800	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
01.1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.860.714.700	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
<i>03.1</i>	<i>01</i>		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>4.994.370.600</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	222.069.000	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1 dokumen
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	272.772.500	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.499.529.100	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	205 unit
<i>03.1</i>	<i>02</i>		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>294.946.300</i>	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	294.946.300	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	1.221.552.700	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>69.911 Ha</i>
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	345.015.200	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 dokumen
03.1	03	002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	345.015.200	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	337.750.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 dokumen
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	193.772.300	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 laporan
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3.178.199.700	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>40 Ha</i>
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.982.162.700	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	196.037.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.972.447.400	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	187.440.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.000 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	784.635.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.000.372.400	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	28 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	199.198.000	<i>Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu</i>	<i>1 unit</i>
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	199.198.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 unit manajemen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.656.194.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	1.656.194.000	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>2 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	206.019.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.023.680.200	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 kelompok
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	426.494.800	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.680.181.301	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	180.120.000	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	02	003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	55.320.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
01.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	42.720.000	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	42.720.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	135.026.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	83.426.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	02	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.600.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.973.681	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.853.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.972.100	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.536.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.590.000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.021.781	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	568.866.800	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	37.656.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	271.294.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	259.916.800	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	870.657.320	<i>Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.992.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.957.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	775.707.520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	242.817.500	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	<i>32 unit</i>
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.297.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.520.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.222.590.100	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	1.555.098.600	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.555.098.600	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	192.270.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	192.270.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	579.427.600	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312.160 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	115.560.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	463.867.600	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.709.264.500	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	115 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	145.660.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.563.604.500	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.095.689.400	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	898.639.900	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44.126 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	264.676.500	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.932.373.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 laporan
03.1	07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	90.840.000	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 unit manajemen
03.1	07	002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	90.840.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.495.096.900	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>1.495.096.900</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>3 laporan</i>
05.1	01	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	102.261.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 orang
05.1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	487.880.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH/KUPS
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	904.955.900	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.486.437.365	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>190.560.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	02	03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	71.040.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
01.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>44.640.000</i>	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>4 laporan</i>
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	44.640.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>221.248.000</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas	43.381.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas	2 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Beserta Atribut Kelengkapannya		Beserta Atribut Kelengkapan	
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	177.867.000	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	606.751.145	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.613.400	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.007.745	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	526.130.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.151.346.500	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	45 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	28.051.800	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.123.294.700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	965.782.720	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.370.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.090.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	863.322.720	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	306.109.000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	11 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.529.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	80.580.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.324.414.900	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	1.605.360.900	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.605.360.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	146.664.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	146.664.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	182.520.000	<i>Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola</i>	<i>301.650 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	182.520.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3.264.542.000	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>50 hektar</i>
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.264.542.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	92,5 hektar
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	-	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.971.894.000	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	282.396.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan	300 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Hutan	
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	587.886.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.101.612.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 laporan
03.1	06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	153.434.000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 unit
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	153.434.000	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 unit manajemen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.132.354.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.132.354.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 laporan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	426.120.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KTH
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	706.234.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.326.527.760	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	124.800.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	141.654.000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	41.814.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	99.840.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	524.758.040	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.048.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.110.040	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	383.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	558.845.100	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	55.248.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	196.767.100	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit
01.1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	306.830.000	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	777.377.220	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.004.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.146.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.157.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	652.069.120	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.093.400	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.093.400	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	20 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.646.646.800	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>1.067.844.900</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.067.844.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>566.481.000</i>	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>3 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	566.481.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>331.000.000</i>	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>132.335 Ha</i>
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	331.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>2.152.908.600</i>	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>27 Ha</i>
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.152.908.600	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>2.528.412.300</i>	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	200.362.800	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152.098 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.025.161.700	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.302.887.800	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.115.595.700	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
<i>05.1</i>	<i>01</i>		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>2.115.595.700</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>5 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	90.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 orang
05.1	01	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	173.100.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KTH/KUPS
05.1	01	03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.852.495.700	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.833 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.086.039.044	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
<i>01.1</i>	<i>02</i>		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>138.240.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	01	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	138.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
<i>01.1</i>	<i>05</i>		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>162.579.300</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	74.379.300	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.200.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	9 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Pelatihan	
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	924.602.204	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.954.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.153.004	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.607.800	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.386.500	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	855.500.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	629.088.600	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	125.613.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	503.475.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.199.440	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.781.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	768.418.240	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.329.500	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.189.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.140.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.709.382.166	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	<i>4.105.009.300</i>	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.105.009.300	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH dan Resort, serta Pembangunan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>777.243.500</i>	<i>Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya</i>	<i>3 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	777.243.500	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Inventarisasi, RPHJP dan RPHJPd	4 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>1.967.469.000</i>	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>75 Ha</i>
03.1	04	002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	1.967.469.000	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>2.859.660.366</i>	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>1 kasus</i>
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.066.770.816	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.792.889.550	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG	1.968.037.950	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
			KEHUTANAN		
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	1.968.037.950	<i>Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i> 2 laporan
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.705.725.600	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan 4 KTH
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	262.312.350	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial 30 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau					
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.406.611.060	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan 84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>148.800.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i> 12 laporan
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>74.643.000</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i> 12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	31.635.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 2 paket
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	43.008.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 dokumen
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>638.362.260</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> 12 bulan
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	94.335.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 6 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.419.260	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 2 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	529.608.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	<i>477.044.000</i>	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah</i> 8 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Pemerintah Daerah</i>		<i>penunjang pemerintah daerah</i>	
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	85.016.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	392.028.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	790.263.800	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.411.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	637.852.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	277.498.000	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	32 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.628.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.870.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14.330.613.300	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	3.108.929.100	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.108.929.100	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	471.899.500	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	471.899.500	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan</i>	377.014.500	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	94.000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan Lindung</i>			
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	134.072.500	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	242.942.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	7.802.288.000	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	260 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	7.802.288.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	2.502.720.200	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	3 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	224.052.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239.700 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	301.144.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.977.524.200	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 laporan
03.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	67.762.000	<i>Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu</i>	1 unit manajemen
03.1	07	002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	67.762.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan. Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.464.059.375	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	1.464.059.375	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>8 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	472.439.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	691.220.375	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	300.400.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.888.218.985	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>101.760.000</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 Laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	101.760.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>434.921.665</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.661.465	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.931.200	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.209.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	354.120.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					SKPD	
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.082.200	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	10 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	58.029.200	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	261.053.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.426.540.720	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	156.829.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.269.711.520	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457.114.400	Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	41.599.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	223.609.400	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit
01.1	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	191.906.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	6.152.224.122	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.200.000.000	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.200.000.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi	400.000.000	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
			<i>(KPHK)</i>		
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	400.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	230.000.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i> 37.578 Ha
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	230.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi 1 dokumen
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	-	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan 1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	2.307.781.500	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i> 100 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	150.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) 1 dokumen
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.157.781.500	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara 50 Ha
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	2.010.242.622	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i> 2 kasus
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	600.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 2 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.410.242.622	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 4 dokumen
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	4.200.000	<i>Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu</i> 1 unit
03.1	06	003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	4.200.000	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi 2 unit manajemen
04			PROGRAM KONSERVASI	100.000.000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan 0 %

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	100.000.000	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP</i>	<i>1 laporan</i>
04.1	03	004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	100.000.000	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.110.792.600	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	5.110.792.600	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>8 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	359.341.950	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 orang
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	4.751.450.650	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.792.393.446	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	202.800.000	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
01.1	02	005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	54.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan
01.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	54.000.000	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan</i>	<i>2 laporan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					<i>Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	54.000.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	133.389.000	<i>Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	35.409.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	97.980.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.092.875.286	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.081.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	416.529.886	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	22.834.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.008.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	594.422.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	427.928.200	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	25 unit
01.1	07	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	427.928.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	69 unit
01.1	07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	07	011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.616.680	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.780.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	138.382.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	717.454.080	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.017.784.280	Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 unit
01.1	09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	54.195.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	367.093.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	257.303.680	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
01.1	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	339.192.100	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	12.050.068.925	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.477.742.325	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 dokumen
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	149.999.600	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana	4.327.742.725	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan	34 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Operasionalisasi KPH		Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	660.468.500	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	660.468.500	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1.059.357.500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132.792 Ha
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	154.672.500	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	53.920.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	850.765.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.771.758.900	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.528.606.400	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	243.152.500	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.080.741.700	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	250.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541.626,08 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan	1.039.220.000	Jumlah Laporan	14 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.791.521.700	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	16 laporan
03.1	07		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>	-	<i>Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif</i>	<i>1 UM</i>
03.1	07	002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.338.492.675	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	5.338.492.675	<i>Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>32 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	599.160.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	724.868.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	4.014.464.675	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.517.042.961	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	139.200.000	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil	12 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	184.679.400	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	71.205.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.474.400	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	966.817.281	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.972.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.610.781	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.951.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.003.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	850.280.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	683.561.900	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	74.676.000	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	391.721.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 unit
01.1	07	009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	217.164.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
01.1	07	010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	932.078.680	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					<i>Pemerintah Daerah</i>	
01.1	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.058.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 laporan
01.1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	96.482.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	832.538.080	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	610.705.700	Jumlah Unit barang yang dipelihara	40 unit
01.1	09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	252.088.500	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.857.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.470.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit
19.01	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
19.01	09	011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	155.290.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.491.886.900	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.393.744.900	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 dokumen
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	268.904.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.124.840.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	318.260.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	318.260.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	587.476.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>85.751 Ha</i>
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	250.516.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	336.960.000	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3.324.890.000	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>95 Ha</i>
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.629.280.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	695.610.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.867.516.000	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	136.560.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410.738,46 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	390.236.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.340.720.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.203.832.600	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	2.203.832.600	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>12 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	209.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	841.225.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.153.607.600	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.767.618.764	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	213.720.000	<i>Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen
01.1	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	64.920.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan
01.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	27.120.000	<i>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27.120.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian</i>	149.070.000	<i>Jumlah Laporan Administrasi</i>	<i>12 laporan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Perangkat Daerah</i>		<i>Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.510.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 paket
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	27.120.000	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 dokumen
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	79.440.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	596.628.059	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah</i>	12 bulan
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.893.700	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	51.830.959	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.864.200	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.700.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
01.1	06	006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	437.400.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.896.049.740	<i>Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	81 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	111.649.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.784.400.140	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.152.583.165	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.410.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.023.172.365	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	732.447.800	<i>Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>	44 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	159.475.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.940.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	558.032.300	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.922.817.100	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	3.653.187.800	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	1 dokumen
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	332.628.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.320.559.800	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	64 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	358.416.000	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>	2 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	358.416.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan</i>	510.153.000	<i>Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan</i>	96,298 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan Lindung</i>		<i>Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola</i>	
03.1	03	001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	222.702.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	133.202.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 dokumen
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	154.249.000	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3.297.175.300	<i>Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan</i>	124 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	136.480.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 dokumen
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.987.435.300	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	124 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	173.260.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 laporan
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	2.103.885.000	<i>Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani</i>	3 kasus
03.1	05	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	156.104.000	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	2 kegiatan
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	346.108.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.601.673.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.092.748.398	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	2.092.748.398	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>15 laporan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	140.244.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 orang
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.952.504.398	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.200 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.880.677.342	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>193.320.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	02	007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51.720.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>193.618.000</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	124.818.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	68.800.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>2.830.896.902</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.838.240.350	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Disediakan	
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.910.552	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	964.746.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	82.149.900	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i>	31 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	42.675.200	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.474.700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.107.911.940	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan
01.1	08	001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204.514.900	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	895.897.040	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	472.780.600	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	31 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	416.725.600	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.055.000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.422.691.350	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m³/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan</i>	9.062.482.350	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target
			<i>Provinsi</i>		
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	425.956.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok 3 unit
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	8.636.526.350	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun 53 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	250.000.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan</i> 1 dokumen
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	250.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun 1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	304.610.000	<i>Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i> 350 Ha
03.1	03	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	153.410.000	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun 1 dokumen
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	151.200.000	Jumlah laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan 2 unit
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.271.000.000	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i> 2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	479.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan 1.000 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	250.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 12 laporan
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	542.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun 12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	09		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.271.000.000	<i>Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar</i>	<i>1 Lap; Sertif; UnitUsaha</i>
03.1	09	001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	479.000.000	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 unit usaha
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0 %
04.1	02		<i>Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi</i>	<i>100.000.000</i>	<i>Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)</i>	<i>1 laporan</i>
04.1	02	001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	6.232.064.921	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>6.232.064.921</i>	<i>Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>4 laporan</i>
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	382.543.571	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan	10 KTH/KUPS

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Kelembagaan	
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.849.521.350	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha
06			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1.400.000.000	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13 %
06.1	01		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	<i>1.400.000.000</i>	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS</i>	<i>4 dokumen</i>
06.1	01	002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.400.000.000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 dokumen
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	2.584.235.771	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>136.230.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	136.230.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>136.200.000</i>	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	<i>2 laporan</i>
01.1	03	005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	136.200.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>495.006.000</i>	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.832.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 stell
01.1	05	004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	203.040.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48 stell
01.1	05	009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	241.134.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>822.069.975</i>	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan</i>	<i>12 bulan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
01.1	06	001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.597.900	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.704.075	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket
01.1	06	003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.432.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	43.496.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	528.840.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	18.347.500	<i>Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah</i>	30 unit
01.1	07	005	Pengadaan Mebel	18.347.500	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit
01.1	08		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	733.489.296	<i>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	12 bulan
01.1	08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.194.176	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan
01.1	08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	671.295.120	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	242.893.000	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	2 unit
01.1	09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	187.686.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit
01.1	09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.670.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.537.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.271.086.950	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	2.023.441.950	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>2 dokumen</i>
03.1	01	002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	600.000.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 unit
03.1	01	003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.423.441.950	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	87 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	675.000.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>2 dokumen</i>
03.1	02	001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	675.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	2.900.175.000	<i>Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala</i>	<i>25 Ha</i>
03.1	03	002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	700.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	2 dokumen
03.1	03	005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	1.149.375.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 dokumen
03.1	03	008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan	330.800.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			di KPH		Pemanfaatan Hutan di KPH	
03.1	03	009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	720.000.000	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan	2 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.704.875.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha
03.1	04	001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	150.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.127.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha
03.1	04	008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	427.875.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.967.595.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.1	05	002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	299.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649.761,85 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	568.595.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.100.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.897.150.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.897.150.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	7 laporan
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang	500.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kehutanan			
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	677.150.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	720.000.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2023 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III.

BAB III **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (001)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menganggarkan sebesar Rp 281.527.714.592 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 241.003.377.265 atau 85,61%. Sedangkan pada tahun 2022 lalu, program ini dianggarkan sebesar Rp 383.200.535.778 dan terealisasi sebesar Rp 121.590.274.126 atau 31,73 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran sebesar Rp 101.672.821.186 namun terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp 119.413.103.139. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (001.1.01)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.177.036.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.121.077.145 atau 97,43 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.036.500.000 dan terealisasi sebesar Rp 881.027.800 atau 85 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2023 yakni sebesar Rp 1.140.536.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.240.049.345. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ◆ **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (001.1.01.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 817.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 797.507.253 atau 97,54 %. Sedangkan pada tahun 2022, dianggarkan sebesar Rp 533.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 428.280.300 atau 80,26 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 284.000.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 369.226.953. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

- ◆ **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (001.1.01.007)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.359.436.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.323.569.892 atau mencapai 97,36 %. Sedangkan tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 502.900.000 dan terealisasi sebesar Rp

452.747.500 atau 90,03%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 856.536.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 870.822.392. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (001.1.02)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 105.659.146.187 dan terealisasi sebesar Rp 101.528.295.635 atau mencapai 96,09 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 159.680.180.162 dan terealisasi sebesar Rp 86.507.762.201 atau mencapai 54,18 %. Pada tahun ini terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 54.021.033.975 namun terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp 15.020.533.434. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (001.1.02.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar 100.744.795.187 dan terealisasi sebesar Rp 96.747.118.342 atau mencapai 96,03 %. Sedangkan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 155.787.219.262 dan terealisasi sebesar Rp 83.183.817.763 atau 53,40 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 55.042.424.075 namun terjadi kenaikan realisasi sebesar Rp 13.563.300.579 pada tahun ini. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (001.1.02.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.587.580.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.496.800.000 atau mencapai 97,47 %. Sedangkan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 3.217.073.900 dan terealisasi sebesar Rp 2.706.115.900 atau 84,12 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 370.506.100 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 790.684.100. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (001.1.02.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 126.360.000 dan terealisasi sebesar Rp 124.348.501 atau mencapai 98,41 %. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (001.1.02.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.033.097.700 dan terealisasi sebesar Rp 995.754.394 atau mencapai 96,39 %. Sedangkan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 284.543.000 dan terealisasi sebesar Rp 270.954.050 atau 95,22 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 748.554.700 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 724.800.344. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (001.1.02.007)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 167.313.300 dan terealisasi sebesar Rp 164.274.398 atau mencapai 98,18%. Sedangkan pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp 391.344.000 dan terealisasi sebesar Rp 346.874.488 atau 88,64%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp 224.030.700 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp 182.600.090. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan untuk mengefisienkan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2023.

➤ **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (001.1.03)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.024.293.100 dan terealisasi sebesar Rp 986.522.924 atau mencapai 96,31%. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 389.944.000 dan terealisasi sebesar Rp 351.085.660 atau 90,03%. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 634.349.100 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 635.437.264 dari tahun lalu. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (001.1.03.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.513.300 dan terealisasi sebesar Rp 21.470.000 atau mencapai 99,80 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.582.000 dan terealisasi sebesar Rp 9.556.000 atau 99,73%. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 11.931.300 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 11.914.000 dari tahun

lalu. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (001.1.03.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 292.765.000 dan terealisasi sebesar Rp 283.622.890 atau mencapai 96,88 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 161.580.000 dan terealisasi sebesar Rp 138.528.660 atau 85,73 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 131.185.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 145.094.230. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (001.1.03.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 390.148.800 dan terealisasi sebesar Rp 382.197.814 atau mencapai 97,96 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 86.682.000 dan terealisasi sebesar Rp 86.561.000 atau 99,86 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 303.466.800 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp 295.636.814. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (001.1.03.006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 319.866.000 dan terealisasi sebesar Rp 299.232.220 atau mencapai 93,55%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 132.100.000 dan terealisasi sebesar Rp 116.440.000 atau 88,15%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 187.766.000 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp 182.792.220. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (001.1.05)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.426.356.000 dan terealisasi sebesar Rp 4.065.073.347 atau mencapai 91,84%. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.378.600.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.850.546.762 atau 77,80%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2.047.756.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.214.526.585. Hal ini terjadi

dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (001.1.05.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.799.214.900 dan terealisasi sebesar Rp 1.685.858.268 atau mencapai 93,70%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.581.138.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.398.199.821 atau 88,43%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 218.076.900 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 287.658.447. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (001.1.05.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 321.648.000 dan terealisasi sebesar Rp 320.477.106 atau mencapai 99,64%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.342.000 dan terealisasi sebesar Rp 88.619.900 atau 98,09%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 231.306.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 231.857.206. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (001.1.05.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 207.850.000 dan terealisasi sebesar Rp 137.640.000 atau mencapai 66,22%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (001.1.05.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.855.618.800 dan terealisasi sebesar Rp 1.726.401.932 atau mencapai 93,04%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 597.740.000 dan terealisasi sebesar Rp 302.061.217 atau 50,53%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.257.878.800 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.424.340.715. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (001.1.05.011)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 109.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 61.665.824,00 atau mencapai 56,38 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 152.900.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 79.465.188,00 atau 51,97 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 43.520.000,00 dan juga penurunan realisasi sebesar Rp 17.799.364,00. Hal ini dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan adanya kendala dalam melaksanakan kegiatan (faktor cuaca, waktu, tenaga, dan lain sebagainya).

➤ **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (001.1.06)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.310.486.540 dan terealisasi sebesar Rp 19.600.511.144 atau mencapai 96,50%. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.058.314.821 dan terealisasi sebesar Rp 8.058.774.297 atau 88,97 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 11.252.171.719 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 11.541.736.847. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (001.1.06.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 188.632.565 dan terealisasi sebesar Rp 186.965.960 atau mencapai 99,12%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 227.800.034 dan terealisasi sebesar Rp 191.721.266 atau 84,16 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 39.167.469 dan penurunan realisasi sebesar Rp 4.755.306. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (001.1.06.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.799.560.184 dan terealisasi sebesar Rp 3.701.205.121 atau mencapai 97,41%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.351.521.787 dan terealisasi sebesar Rp 2.109.249.040 atau 89,70%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.448.038.397 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.591.956.081. Hal

ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (001.1.06.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 546.564.830 dan terealisasi sebesar Rp 541.615.695 atau mencapai 99,09%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 343.061.000 dan terealisasi sebesar Rp 331.152.200 atau 96,53%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 203.503.830 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 210.463.495. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (001.1.06.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 319.049.985 dan terealisasi sebesar Rp 317.335.110 atau mencapai 99,46%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 328.592.128 dan terealisasi sebesar Rp 292.832.377 atau 89,12%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 9.542.143 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 24.502.733. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (001.1.06.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 473.094.392 dan terealisasi sebesar Rp 459.489.854 atau mencapai 97,12%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 455.589.372 dan terealisasi sebesar Rp 349.014.615 atau 76,61 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 17.505.020 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 110.475.239. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (001.1.06.006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.331.200 dan terealisasi sebesar Rp 21.202.000 atau mencapai 99,39 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 19.200.000 dan terealisasi sebesar Rp 17.870.000 atau 93,07%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2.131.200 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 3.332.000. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (001.1.06.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.577.644.600 dan terealisasi sebesar Rp 14.095.690.629 atau mencapai 96,69 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.332.550.500 dan terealisasi sebesar Rp 4.766.934.799 atau 89,39 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 9.245.094.100 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 9.328.755.830. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (001.1.06.010)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 55.942.500 dan terealisasi sebesar Rp 50.607.000 atau mencapai 90,46%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (001.1.06.011)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 328.666.284 dan terealisasi sebesar Rp 226.399.775 atau mencapai 68,88 %. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

➤ **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (001.1.07)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 111.065.674.224 dan terealisasi sebesar Rp 78.317.425.354 atau mencapai 70,51%. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 185.001.554.052 dan terealisasi sebesar Rp 4.590.148.387 atau 2,48 %. Terjadi penurunan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 73.935.879.828 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 73.727.276.967. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran dan adanya kenaikan realisasi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (001.1.07.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 523.750.000 dan terealisasi sebesar Rp 523.750.000 atau 100 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak ada pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.1.07.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 73.853.045.892 dan terealisasi sebesar Rp 46.955.393.752 atau 63,58%. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.442.462.136 dan terealisasi sebesar Rp 0 atau 0%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 71.410.583.756 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 46.955.393.752. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (001.1.07.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 816.877.700 dan terealisasi sebesar Rp 790.959.207 atau mencapai 96,83%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.037.719.000 dan terealisasi sebesar Rp 884.945.742 atau 85,28%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 220.841.300 dan penurunan realisasi sebesar Rp 93.986.535. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran pada tahun 2023 dan belum maksimalnya kegiatan dilaksanakan selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (001.1.07.006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 32.833.712.732 dan terealisasi sebesar Rp 27.128.926.305 atau mencapai 82,63 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 177.253.904.122 dan terealisasi sebesar Rp 22.382.928.199 atau 1,34 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 144.420.191.390 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 4.745.998.106. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran dan adanya kenaikan realisasi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud (001.1.07.008)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 35.943.967 atau mencapai 99,84%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud tidak ada pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.07.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 217.164.000 dan terealisasi sebesar Rp 216.400.000 atau mencapai 99,65%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 827.646.700 dan terealisasi sebesar Rp 230.611.897 atau 27,86%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 610.482.700 dan penurunan realisasi sebesar Rp 14.211.897. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefisienkan anggaran pada tahun 2023 dan belum maksimalnya kegiatan dilaksanakan selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.07.010)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 306.830.000 dan terealisasi sebesar Rp 251.121.452 atau mencapai 22,83 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.100.324.320 dan terealisasi sebesar Rp 251.243.000 atau 22,83%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 793.494.320 dan penurunan realisasi sebesar Rp 121.548. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefisienkan anggaran pada tahun 2023 dan belum maksimalnya kegiatan dilaksanakan selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.07.011)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.478.293.900 dan terealisasi sebesar Rp 2.414.930.671 atau mencapai 97,44%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.556.544.774 dan terealisasi sebesar Rp 362.875.868 atau 23,31%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 921.749.126 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.052.054.803. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (001.1.08)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.836.715.361 dan terealisasi sebesar Rp 21.613.133.076 atau mencapai 94,64 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.258.656.036 dan terealisasi sebesar Rp 13.612.002.337 atau 83,72 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 6.578.059.325 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 8.001.130.739. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (001.1.08.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 78.350.800 dan terealisasi sebesar Rp 61.563.000 atau mencapai 78,57 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 71.384.760 dan terealisasi sebesar Rp 42.352.050 atau 59,33 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 6.966.040 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 19.210.950. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (001.1.08.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.787.815.376 dan terealisasi sebesar Rp 2.986.335.958 atau mencapai 78,84 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.070.515.760 dan terealisasi sebesar Rp 2.014.393.049 atau 65,60 %. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini sebesar Rp 717.299.616 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 971.942.909. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (001.1.08.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 256.185.500 dan terealisasi sebesar Rp 245.887.500 atau mencapai 95,98 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.235.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.310.000 atau 16,36 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 235.950.500 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 242.577.500. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (001.1.08.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 18.714.363.685 dan terealisasi sebesar Rp 18.319.346.618 atau mencapai 97,89 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.096.520.516 dan terealisasi sebesar Rp 11.551.947.238 atau 88,21 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 5.617.843.169 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 6.767.399.380. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (001.1.09)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.028.007.180 dan terealisasi sebesar Rp 12.771.338.640 atau mencapai 91,04 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 9.396.786.707 dan terealisasi sebesar Rp 5.738.926.682 atau 61,07 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 4.631.220.473 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 7.032.411.958. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (001.1.09.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 436.746.300 dan terealisasi sebesar Rp 378.865.273 atau mencapai 86,75 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 342.092.800,00 dan terealisasi sebesar Rp 188.598.900 atau 55,13 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 94.653.500 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 190.266.373. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (001.1.09.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.298.539.700 dan terealisasi sebesar Rp 5.268.806.837 atau mencapai 86,65 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.195.848.050 dan terealisasi sebesar Rp 3.387.102.467 atau 65,19 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.102.691.650 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.881.704.370. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel (001.1.09.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 20.250.000 dan terealisasi sebesar Rp 17.880.000 atau mencapai 88,30%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel tidak ada pada tahun anggaran 2022.

◆ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (001.1.09.006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.093.425.900 dan terealisasi sebesar Rp 991.398.651 atau mencapai 90,67 %. Sedangkan pada

tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 929.236.500 dan terealisasi sebesar Rp 566.030.625 atau 60,91 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 164.189.400 dan juga kenaikan realisasi sebesar Rp 425.368.026. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (001.1.09.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.987.669.080 dan terealisasi sebesar Rp 2.953.309.956 atau mencapai 98,85%. Pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.442.219.746 dan terealisasi sebesar Rp 572.368.355 atau 39,69%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.545.449.334 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.380.941.601. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.09.010)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 875.307.400 dan terealisasi sebesar Rp 864.523.938 atau mencapai 98,77%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 850.942.505 dan terealisasi sebesar Rp 847.267.000 atau 99,57 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 24.364.895 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 17.256.938. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (001.1.09.011)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.316.068.800 dan terealisasi sebesar Rp 2.296.553.985 atau mencapai 99,16 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 636.447.106 dan terealisasi sebesar Rp 177.559.335 atau 27,90 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.679.621.694 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.118.994.650. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Program Pengelolaan Hutan (03)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menganggarkan sebesar Rp 246.750.861.972 pada Program Pengelolaan Hutan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 216.025.658.262 atau 87,55 %. Sedangkan pada

tahun 2022 lalu, program ini dianggarkan sebesar Rp 112.009.940.674 dan terealisasi sebesar Rp 48.585.734.574 atau 43,38 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 134.740.921.290 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 167.439.923.680. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (003.1.01)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 66.520.113.183 dan terealisasi sebesar Rp 58.779.247.782 atau mencapai 88,36 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 17.977.578.373 dan terealisasi sebesar Rp 7.509.737.137 atau 41,77 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 48.542.534.810 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 51.269.510.645. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (003.1.01.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 222.069.000 dan terealisasi sebesar Rp 198.986.620 atau 89,61 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.684.531.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.055.524.855 atau 55,79 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 3.462.462.000 dan penurunan realisasi sebesar Rp 1.856.538.235. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran pada tahun 2023 dan belum maksimalnya kegiatan dilaksanakan selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (003.1.01.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.050.260.100 dan terealisasi sebesar Rp 1.896.070.189 atau 92,48 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.666.397.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.168.213.259 atau 70,10 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 383.863.100 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 727.856.930. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (003.1.01.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 64.247.784.083 dan terealisasi sebesar Rp 56.684.190.973 atau mencapai 88,23 %. Sedangkan pada

tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 16.311.181.373 dan terealisasi sebesar Rp 6.341.523.878 atau 38,88 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 47.936.602.710 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 50.342.667.095. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (003.1.02)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.781.484.150 dan terealisasi sebesar Rp 8.136.309.882 atau mencapai 92,65 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.947.945.900 dan terealisasi sebesar Rp 4.622.448.792 atau 66,53 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.833.538.250 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 3.513.861.090. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (003.1.02.001)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.781.484.150 dan terealisasi sebesar Rp 8.136.309.882 atau mencapai 92,65 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.947.945.900 dan terealisasi sebesar Rp 4.622.448.792 atau 66,53 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.833.538.250 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 3.513.861.090. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (003.1.03)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.517.800.800 dan terealisasi sebesar Rp 19.706.422.388 atau mencapai 78,20 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.635.839.350 dan terealisasi sebesar Rp 5.971.368.058 atau 78,20 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 14.881.961.450 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 13.735.054.330. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (003.1.03.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.257.927.700 dan terealisasi sebesar Rp 3.101.163.708 atau mencapai 95,19 %. Sedangkan pada

tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.209.345.600 dan terealisasi sebesar Rp 915.729.202 atau 75,72 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2.048.582.100 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.185.434.506. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung (003.1.03.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.337.935.200 dan terealisasi sebesar Rp 1.251.185.277 atau mencapai 93,52 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.008.298.000 dan terealisasi sebesar Rp 920.357.930 atau 91,28 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 329.637.200 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 330.827.347. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi (003.1.03.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 11.853.185.600 dan terealisasi sebesar Rp 9.743.666.911 atau mencapai 82,20 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.257.729.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.741.671.852 atau 84,16 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 8.595.456.600 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 7.001.995.059. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung (003.1.03.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.302.785.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.293.562.008 atau mencapai 99,29 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung tidak ada pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi (003.1.03.006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.851.796.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.466.206.987 atau mencapai 86,48 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi tidak ada pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (003.1.03.008)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 485.049.000 dan terealisasi sebesar Rp 474.192.849 atau mencapai 97,76 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 519.417.000 dan terealisasi sebesar Rp 361.384.600 atau 69,58 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 34.368.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 112.808.249. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran pada tahun 2023 dan terjadi kenaikan realisasi karena maksimalnya kegiatan dilaksanakan selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan (003.1.03.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.429.122.300 dan terealisasi sebesar Rp 1.376.444.648 atau mencapai 96,31 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.641.049.750 dan terealisasi sebesar Rp 1.032.224.474 atau 62,90 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 211.927.450 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 344.220.174. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran pada tahun 2023 dan naiknya realisasi dikarenakan maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 74.368.043.371 dan terealisasi sebesar Rp 65.422.856.152 atau mencapai 87,97 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 36.519.787.740 dan terealisasi sebesar Rp 8.050.349.918 atau 22,04 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 37.848.255.631 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 57.372.506.234. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) (003.1.04.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.298.562.370 dan terealisasi sebesar Rp 1.111.708.141 atau 85,61 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.575.228.000 dan terealisasi sebesar Rp 858.322.614 atau 54,49%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 276.665.630 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 253.385.527. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiesikan anggaran pada tahun 2023 dan naiknya

realisasi dikarenakan maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.967.469.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.745.810.250 atau 88,73%. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.796.140.722 dan terealisasi sebesar Rp 5.341.952.821 atau 20,71%. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 23.282.671.722 dan penurunan realisasi sebesar Rp 3.596.142.571. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiensikan anggaran pada tahun 2023 dan belum maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 64.710.754.000 dan terealisasi sebesar Rp 56.975.315.779 atau 88,05%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 25.989.784.240 dan terealisasi sebesar Rp 5.034.142.304 atau 54,49%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 38.720.969.760 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 51.941.173.475. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (003.1.04.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.165.397.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.159.816.200 atau 99,52 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (003.1.04.008)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.225.861.001 dan terealisasi sebesar Rp 4.430.205.782 atau 84,77 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.954.775.500 dan terealisasi sebesar Rp 2.157.885.000,00 atau 54,49 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 3.728.914.499 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.272.320.782. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiensikan anggaran pada tahun 2023 dan naiknya realisasi dikarenakan maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (003.1.05)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 60.047.880.688 dan terealisasi sebesar Rp 51.342.000.554 atau mencapai 85,50 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 33.573.988.371 dan terealisasi sebesar Rp 19.302.580.258 atau 57,49 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 26.473.892.317 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 32.039.420.296. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (003.1.05.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 651.449.500 dan terealisasi sebesar Rp 505.859.165 atau 77,65 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.380.388.450 dan terealisasi sebesar Rp 826.204.700 atau 59,85 %. Terjadi penurunan anggaran sebesar Rp 728.938.950 dan penurunan realisasi sebesar Rp 320.345.535. Adanya penurunan anggaran dikarenakan untuk mengefesiensikan anggaran pada tahun 2023 dan belum maksimalnya kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan (003.1.05.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.807.730.700 dan terealisasi sebesar Rp 4.412.424.588 atau 91,78 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 981.642.000 dan terealisasi sebesar Rp 806.710.134 atau 82,18 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 3.826.088.700 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 3.605.714.454. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan (003.1.05.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 810.975.000 dan terealisasi sebesar Rp 800.581.549 atau 98,72 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 52.146.000 dan terealisasi sebesar Rp 39.500.000 atau 75,75%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 758.829.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 761.081.549. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (003.1.05.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 14.849.272.636 dan terealisasi sebesar Rp 13.171.067.681 atau 88,70 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.179.282.400 dan terealisasi sebesar Rp 5.753.878.690 atau 70,35 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 6.669.990.236 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 7.417.188.991. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (003.1.05.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 38.928.452.852 dan terealisasi sebesar Rp 32.452.067.571 atau 83,36 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 22.980.529.521 dan terealisasi sebesar Rp 11.876.286.734 atau 51,68 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 15.947.923.331 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 20.575.780.837. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (003.1.06)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.075.468.300 dan terealisasi sebesar Rp 5.440.697.740 atau mencapai 89,55 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.150.964.000 dan terealisasi sebesar Rp 636.778.320 atau 12,36 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 924.504.300 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 4.803.919.420. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati (003.1.06.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 228.276.300 dan terealisasi sebesar Rp 214.085.321 atau 93,78 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 111.149.000 dan terealisasi sebesar Rp 79.543.954 atau 71,57 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 117.127.300 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 134.541.367. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (003.1.06.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.847.192.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.226.612.419 atau 89,39 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.039.815.000 dan terealisasi sebesar Rp 557.234.366 atau 11,06%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 807.377.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 4.669.378.053. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (003.1.07)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.379.232.000 dan terealisasi sebesar Rp 2.121.331.767 atau mencapai 89,16%. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 491.511.000 dan terealisasi sebesar Rp 308.803.948 atau 62,83%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.887.721.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.812.527.819. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (003.1.07.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 774.590.000 dan terealisasi sebesar Rp 676.277.735 atau mencapai 87,31%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan Sub Kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (003.1.07.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 932.682.000 dan terealisasi sebesar Rp 873.722.538 atau mencapai 93,68%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 491.511.000 dan terealisasi sebesar Rp 308.803.948 atau 62,83 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 441.171.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 564.918.590. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (003.1.07.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 671.960.000 dan terealisasi sebesar Rp 571.331.494 atau mencapai 85,02%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2022.

➤ **Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (003.1.09)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 6.060.839.480 dan terealisasi sebesar Rp 5.076.791.997 atau mencapai 83,76 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.712.325.940 dan terealisasi sebesar Rp 2.183.668.143 atau 58,82 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2.348.513.540 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.893.123.854. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar (003.1.09.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.220.602.800 dan terealisasi sebesar Rp 3.689.486.682 atau mencapai 87,42 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.202.039.940 dan terealisasi sebesar Rp 1.428.459.043 atau 64,87%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 2.018.562.860 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.261.027.639. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih (003.1.09.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 742.427.680 dan terealisasi sebesar Rp 573.192.400 atau 77,21 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 593.525.000 dan terealisasi sebesar Rp 367.014.100 atau 61,84%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 148.902.680 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 206.178.300. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit (003.1.09.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.097.809.000 dan terealisasi sebesar Rp 814.112.915 atau mencapai 74,16 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 916.761.000 dan terealisasi sebesar Rp 388.195.000 atau 42,34 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 181.048.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 425.917.915. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (04)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 12.999.911.900 pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 11.808.271.835 atau 90,83%. Sedangkan pada tahun 2022 program ini dianggarkan sebesar Rp 1.681.530.750 dan terealisasi sebesar Rp 1.337.233.283 atau 79,52%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 11.318.381.150 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 10.471.038.552. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ **Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (004.1.01)**

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 10.904.731.800 dan terealisasi sebesar Rp 9.807.628.814 atau mencapai 89,94 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 917.454.500 dan terealisasi sebesar Rp 798.797.358 atau 87,07 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 9.987.277.300 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 9.008.831.456. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA (004.1.01.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.822.445.200 dan terealisasi sebesar Rp 1.665.326.736 atau mencapai 91,38 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 478.055.000 dan terealisasi sebesar Rp 385.190.411 atau 80,57 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.344.390.200 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.280.136.325. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi (004.1.01.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.962.032.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.872.437.542 atau mencapai 95,43 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi (004.1.01.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 227.688.600 dan terealisasi sebesar Rp 227.142.457 atau mencapai 99,76 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 145.704.500 dan terealisasi sebesar Rp 143.867.109 atau 98,74 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 81.984.100 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 83.275.348. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi (004.1.01.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.856.028.000 dan terealisasi sebesar Rp 5.007.059.396 atau mencapai 85,50 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2022.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi (004.1.01.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 859.538.000 dan terealisasi sebesar Rp 858.854.603 atau mencapai 99,92 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 293.695.000 dan terealisasi sebesar Rp 269.739.838 atau 91,84 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 565.843.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 589.114.765. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi (004.1.01.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 177.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 176.808.080 atau mencapai 99,89 %. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2022.

➤ ***Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) Untuk Kewenangan Daerah Provinsi (004.1.02)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 93.950.700 atau mencapai 93,95 %. Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Kegiatan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) Untuk Kewenangan Daerah Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2022.

◆ **Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (004.1.02.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 93.950.700 atau mencapai 93,95 %. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES tidak ada pada tahun anggaran 2022.

➤ ***Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (004.1.03)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.995.180.100 dan terealisasi sebesar Rp 1.906.692.321 atau mencapai 95,56 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 764.076.250 dan terealisasi sebesar Rp 538.435.925 atau 70,47 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 1.231.103.850 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.368.256.396. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

◆ **Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (004.1.03.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000 dan terealisasi sebesar Rp 56.640.400 atau mencapai 56,64 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 51.700.000 dan terealisasi sebesar Rp 33.697.100 atau 91,84 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 48.300.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 22.943.300. Hal ini terjadi

dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (004.1.03.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.127.300.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.090.709.573 atau mencapai 96,75 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 712.376.250 dan terealisasi sebesar Rp 504.738.825 atau 91,84 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 414.923.750 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 585.970.748. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (004.1.03.006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 767.880.100 dan terealisasi sebesar Rp 759.342.348 atau mencapai 98,89 %. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2022.

• **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (05)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 78.449.735.933 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 71.824.861.267 atau 91,56 %. Sedangkan pada tahun 2022, program ini dianggarkan sebesar Rp 31.031.406.328. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 21.392.745.518 atau 68,94 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 47.418.329.605 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 50.432.115.749. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (005.1.01)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 78.449.735.933 dan terealisasi sebesar Rp 71.824.861.267 atau mencapai 91,56 %. Sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 31.031.406.328 dan terealisasi sebesar Rp 21.392.745.518 atau 68,94 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat

kenaikan anggaran sebesar Rp 47.418.329.605 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 50.432.115.749. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (005.1.01.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 21.518.805.456 dan terealisasi sebesar Rp 20.814.203.315 atau mencapai 96,73 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 12.455.355.600 dan terealisasi sebesar Rp 10.160.935.215 atau 81,58 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 9.063.449.856 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 10.653.268.100. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (005.1.01.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.073.696.311 dan terealisasi sebesar Rp 11.900.657.302 atau mencapai 91,03%. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.796.993.583 dan terealisasi sebesar Rp 2.377.531.615 atau 49,56 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 8.276.702.728 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 9.523.125.687. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (005.1.01.003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 43.857.234.166 dan terealisasi sebesar Rp 39.110.000.650 atau mencapai 89,18 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 13.779.057.145 dan terealisasi sebesar Rp 8.854.278.688 atau 49,56 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 30.078.177.021 dan kenaikan realisasi sebesar 30.255.721.962. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

• **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (06)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp 3.578.275.000 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 3.511.779.037 atau 98,14 %. Sedangkan pada tahun 2022, program ini dianggarkan sebesar Rp 2.385.054.500. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar

Rp 1.160.555.270 atau 48,66 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 1.193.220.500 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.351.223.767. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

➤ ***Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (006.1.01)***

Pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.578.275.000 dan terealisasi sebesar Rp 3.511.779.037 atau 98,14 %. Sedangkan pada tahun 2022, kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.385.054.500. Atas anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp 1.160.555.270 atau 48,66 %. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran sebesar Rp 1.193.220.500 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 2.351.223.767. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS (006.1.01.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 492.697.000 dan terealisasi sebesar Rp 490.232.760 atau 99,50 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 453.697.000 dan terealisasi sebesar Rp 257.611.000 atau 56,78%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 39.000.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 232.621.760. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (006.1.01.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.806.720.000 dan terealisasi sebesar Rp 1.751.225.174 atau mencapai 96,93 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.280.099.500 dan terealisasi sebesar Rp 400.912.770 atau 31,32 %. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 526.620.500 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 1.350.312.404. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (006.1.01.004)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.102.239.600 dan terealisasi sebesar Rp 1.093.846.534 atau mencapai 99,24 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 567.239.600 dan terealisasi

sebesar Rp 429.675.700 atau 75,75%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 535.000.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 664.170.834. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

♦ **Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS (006.1.01.006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 176.618.400 dan terealisasi sebesar Rp 176.474.569 atau mencapai 99,92 %. Sedangkan pada tahun 2022 sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 84.018.400 dan terealisasi sebesar Rp 72.355.800 atau 86,12%. Terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp 92.600.000 dan kenaikan realisasi sebesar Rp 104.118.769. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2023.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan/patroli (*monitoring*).
- Personil teknis yang baru dan belum berpengalaman
- Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru keluar pada bulan Oktober
- Adanya SILPA DBH DR tahun sebelumnya sebesar Rp 25.000.000.000 yang tidak dapat digunakan karena keterbatasan waktu
- Adanya sisa anggaran dari kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (contoh: kegiatan pemadaman tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada kebakaran hutan)
- Adanya SILPA positif dari Pengadaan Barang dan Jasa

BAB IV KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2023 dan berakhir 31 Desember 2023. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Keuangan

Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.

- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)

Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- **Defenisi**

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat sebesar nilai bruto yang diterima.

Pendapatan diklasifikasikan menjadi pendapatan pajak daerah, restibusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- Pengukuran

Belanja dicatat sebesar nilai bruto yang telah dikeluarkan

Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya dan aset tak berwujud.

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Defenisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan sebesar nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/jasa dinilai sebesar harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa dinilai sebesar perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Hibah
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Aset lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, piutang pajak, piutang retribusi, piutang lainnya, penyisihan piutang, beban dibayar dimuka, persediaan dan asuransi dibayar dimuka.

2. Aset non lancar

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset non lancar. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan di peroleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antar jenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur sebesar nilai nominalnya
- Persediaan diukur sebesar nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, sebesar nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi

sendiri dan sebesar nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (Frist in First out).

- Piutang diukur sebesar nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka tia dinilai sebesar nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur sebesar nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur sebesar nilai perolehan atau nilai wajarnya
- Investasi jangka panjang dinilai sebesar nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai sebesar harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat di kapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - a. Menambah kapasitas/volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
Perolehan konstruksi sebesar Rp. 20.000.000 ke atas dan
Perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
- Aset tidak berwujud diukur sebesar nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur sebesar nilai perolehannya.

- **Penyajian**

Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas Daerah

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di BLUD

Kas di Bendahara FKTP

Kas di Bendahara BOS

Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

4.4.2.6 Kewajiban

- **Defenisi**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarakan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

- **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dengan rincian sebagai berikut:

- **EKUITAS**

- EKUITAS
- Surplus/Defisit-LO
- Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua. Penyusunan Laporan ini juga telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2023.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan sebesar Rp 113.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 168.100.000,00 atau sebesar 147,78 %. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 telah menargetkan 1 rincian obyek pendapatan yaitu pendapatan Retribusi Daerah Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			(%)
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	113.750.000,00	168.100.000,00	147,78	50.650.000,00	231,88
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</u>	-	-	-	-	-
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	-	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	113.750.000,00	168.100.000,00	147,78	50.650.000,00	231,88

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	-	-	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	-	-	-	-	-

Pendapatan secara total melampaui target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian pendapatan yang melampaui target. Adapun penjelasan dari masing-masing rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.1.1.1. Pendapatan pajak

Pendapatan pajak daerah adalah pendapatan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penarikan pajak sebagai salah satu pendapatan daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memiliki pendapatan pajak.

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	-	-	-	-	-
Pajak Air Permukaan	-	-	-	-	-
Pajak Rokok	-	-	-	-	-

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
-
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
-
- Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Pajak Air Permukaan
-
- Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Pendapatan Pajak Rokok
-

5.1.1.2. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salahsatu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dari target sebesar Rp. 113.750.000,00 terealisasi sebesar Rp 168.100.000,00 atau 147,78 %, bila dibandingkan dengan tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar Rp 117.450.000,00 atau 231,89 %. Penyebab tercapainya target serta kenaikan antara tahun 2023 dan tahun 2022 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, adapun rincian anggaran dan realisasi ketiga kategori pendapatan retribusi daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	%	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	-	-	-	-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	-	-	-	-	-
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	113.750.000	168.100.000,00	147,78	50.650.000,00	231,88
- Retribusi Tempat Khusus Parkir	-	-	-	-	-
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-	-
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-	-
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	-	-	-	-	-
- Retribusi Kartu Perpustakaan	-	-	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman	-	-	-	-	-
- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman	-	-	-	-	-
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi	-	-	-	-	-
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-	-
- Retribusi Izin Trayek	-	-	-	-	-
- Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	-	-
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA	-	-	-	-	-

5.1.1.2.2 Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari tiga obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum dengan uraian sebagai berikut:

➤ **Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

-

➤ **Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air kepada masyarakat

-

➤ **Retribusi Pelayanan Pendidikan**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi pelayanan pendidikan kepada masyarakat

-

5.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari sembilan obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

➤ **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi Daerah kepada masyarakat atas layanan berupa Penyewaan Gedung Aula Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target sebesar Rp. 113.750.000,00 terealisasi sebesar Rp 168.100.000,00 atau 147,78 %.

➤ **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Tempat Khusus Parkir

-

➤ **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

-

➤ Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

-

➤ Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

-

➤ Retribusi Kartu Perpustakaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Kartu Perpustakaan

-

➤ Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman

-

➤ Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi /Perlindungan Tanaman

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Penggunaan Sarana Proteksi /Perlindungan Tanaman

-

➤ Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi

-

5.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi yang ditarik atas pemberian izin, permohonan, rekomendasi dan surat keterangan kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memperoleh pendapatan dari tiga obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

➤ Retribusi Izin Trayek

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Izin Trayek

-

➤ Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Izin Usaha Perikanan

-

➤ Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak menarik retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA

-

5.1.1.6. Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah. Penjelasan rinci atas Lain-Lain PAD yang sah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
- Pendapatan Denda Pajak - LRA
- Pendapatan Denda Retribusi - LRA
- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
- Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
- Pendapatan dari Pengembalian
- Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
- Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
- Pendapatan BLUD - LRA
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
- Pendapatan dari Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
- Penerimaan Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga - LRA
- Penerimaan Hasil Kerjasama dengan PT. Kaltim Kariangau Terminal - LRA

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan sebesar Rp 623.306.499.397,00 terealisasi sebesar Rp. 544.173.947.666,00 atau sebesar 87,30 %. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 telah menargetkan dua jenis belanja, yaitu belanja operasi dan belanja

modal. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	623.306.499.397	544.173.947.666	87,30	245.281.233.199	121,85
<i>Belanja Operasi</i>	449.445.095.975	409.604.277.559	91,14	226.406.181.827	80,91
Belanja Pegawai	104.548.815.187	100.268.558.342	95,91	97.419.522.602	2,9
Belanja Barang dan Jasa	344.896.280.788	309.335.719.217	89,69	128.986.659.225	139,81
Belanja Hibah	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
<i>Belanja Modal</i>	173.861.403.422	134.569.670.107	77,40	18.875.051.372	612,94
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.913.825.312	96.493.091.949	74,27	10.966.737.563	779,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.201.262.210	31.861.013.740	85,64	6.551.725.348	386,29
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.642.783.400	6.129.220.451	92,27	1.349.376.400	354,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.532.500	86.343.967	83,40	7.212.060	1097,21

Belanja secara total dapat dikatakan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu sebesar 72,11 %. Dari target sebesar Rp. 449.445.095.975,00 terealisasi sebesar Rp 409.604.277.559,00 atau 91,14 %. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<i>Belanja Operasi</i>	449.445.095.975	409.604.277.559	91,14	226.406.181.827	80,91
Belanja Pegawai	104.548.815.187	100.268.558.342	95,91	97.419.522.602	2,92

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	344.896.280.788	309.335.719.217	89,69	128.986.659.225	139,81

▪ Belanja Pegawai

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 104.548.815.187,00 untuk memberikan kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/atau non PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terrealisasi sebesar Rp. 100.268.558.342,00 atau sebesar 95,91 %.

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pegawai	104.548.815.187,00	100.268.558.342,00	95,91	97.419.522.602,00	3419,38
Belanja Gaji dan Tunjangan	41.336.470.130,00	39.601.040.462,00	95,80	39.518.023.008,00	476,02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	59.408.325.057,00	57.146.077.880,00	96,19	54.792.949.594,00	23,28
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.804.020.000,00	3.521.440.000,00	92,57	3.108.550.000,00	7,52
Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	-	-	-	-	-
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	-	-

Tersisanya anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 4.280.256.845,00 atau sebesar 95,91 % disebabkan oleh pegawai pensiun dan meninggal dunia.

▪ Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan sebesar Rp. 344.896.280.788,00 atau sebesar 76.73 %.

Uraian	31 Desember 2023		31 Desember 2022	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Barang dan Jasa	344.896.280.788,00	309.335.719.217,00	89,69	128.986.659.225,13	71,52
Belanja Barang Pakai Habis	108.389.345.010,00	95.711.133.303,00	88,30	26.302.397.878,00	37,89
Belanja Barang Tak Habis Pakai	463.579.500,00	436.202.014,00	94,09	16.574.099,00	3,94
Belanja Jasa Kantor	45.447.185.976,00	41.150.503.077,00	90,55	26.767.377.669,00	186,10
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.528.438.292,00	2.491.518.651,00	98,54	1.966.947.246,00	374,96
Belanja Sewa Tanah	9.098.600,00	9.098.600,00	100,00		0
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.528.508.900,00	1.875.236.323,00	74,16	360.492.740,00	23,79
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	364.194.600,00	244.939.027,00	67,25	101.580.000,00	70,85
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	699.426.000,00	466.806.000,00	66,74	134.100.730,00	40,30
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.353.174.500,00	1.343.521.800,00	99,29	1.000.663.010,00	291,85
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.414.963.900,00	2.768.375.141,00	81,07	297.160.000,00	12,02
Belanja Pemeliharaan Tanah	464.107.600,00	436.224.600,00	93,99	2.420.587.350,00	-121,98
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.351.745.200,00	4.844.593.695,00	90,52	3.146.160.838,00	185,23
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.418.085.380,00	5.119.930.332,00	94,50	2.719.777.960,13	113,31
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	394.475.900,00	388.223.100,00	98,41	253.824.038,00	188,85
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	17.665.057.900,00	15.619.279.050,00	88,42	2.878.833.430,00	22,59
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	8.880.000,00	8.547.000,00	96,25	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	147.563.856.160,00	134.089.844.187,00	90,87	60.542.996.237,00	82,31
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	1.264.137.370,00	938.976.397,00	74,28	-	-
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	280.800.000,00	280.800.000,00	100,00	77.186.000,00	37,90
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.287.220.000,00	1.111.966.920,00	86,39	77.186.000,00	7,45

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa sebesar Rp. 35.560.561.571,00 atau sebesar 10.31 % disebabkan oleh Petunjuk teknis yang seringkali berubah, Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan/patroli (monitoring, Personil teknis yang baru dan belum berpengalaman, Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru keluar pada bulan Oktober, Adanya SILPA DBH DR tahun sebelumnya sebesar Rp 25.000.000.000 yang tidak dapat digunakan karena keterbatasan waktu, Adanya sisa anggaran dari kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (contoh: kegiatan pemadaman tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada kebakaran hutan), Adanya SILPA positif dari Pengadaan Barang dan Jasa

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan sebesar Rp. 173.861.403.422,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terrealisasi sebesar Rp. 134.569.670.107,00 atau sebesar 77,40 %.

Uraian	31 Desember 2021		31 Desember 2020	% Naik (Turun)	
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	173.861.403.422	134.569.670.107	77,40	18.875.051.372	612,95
Belanja Modal Tanah					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	129.913.825.312	96.493.091.949	74,27	10.966.737.563	779,87
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.201.262.210	31.861.013.740	85,64	6.551.725.348	396,29
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.642.783.400	6.129.220.451	92,27	1.349.376.400	354,22
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	103.532.500	86.343.967	83,40	7.212.060	1097,21
Belanja Modal BLUD					

Belanja modal sebesar Rp. 173.861.403.422,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Peralatan Dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

Masih tersisanya anggaran belanja modal sebesar Rp. 18.875.051.372,00 atau sebesar 22,6 % disebabkan oleh Petunjuk teknis yang seringkali berubah, Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan/patroli

(monitoring, Personil teknis yang baru dan belum berpengalaman, Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru keluar pada bulan Oktober, Adanya SILPA DBH DR tahun sebelumnya sebesar Rp 25.000.000.000 yang tidak dapat digunakan karena keterbatasan waktu, Adanya sisa anggaran dari kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (contoh: kegiatan pemadaman tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada kebakaran hutan), Adanya SILPA positif dari Pengadaan Barang dan Jasa

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO sebesar Rp 168.100.000,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2022 sebesar Rp. 50.650.000,00 maka terdapat kenaikan sebesar Rp. 117.450.000,00 atau sebesar 231,89 %. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	168.100.000,00	50.650.000,00	231,89
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO</u>	168.100.000,00	50.650.000,00	231,89
Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	168.100.000,00	50.650.000,00	231,89
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-	-
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	-	-	-
<u>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</u>	-	-	-
Pendapatan Lainnya - LO	-	-	-
<u>PENDAPATAN LUAR BIASA - LO</u>	-	-	-
Pendapatan Luar Biasa - LO	-	-	-

5.1.3.1 Pendapatan Pajak Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Pajak Daerah – LO :

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Pajak Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	-	-	-
Pajak Air Permukaan-LO	-	-	-
Pajak Rokok-LO	-	-	-

- Pajak Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor - LO

-

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO tahun

-

- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO

-

- Pajak Air Permukaan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Pajak Air Permukaan-LO

-

- Pajak Rokok-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Pajak Rokok-LO

-

5.1.3.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp 168.100.000,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 50.650.000,00

maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 117.450.000,00 Atau 231,89 %. Rincian pendapatan pajak daerah - LO tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	-	-	-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	-	-	-
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	168.100.000,00	50.650.000,00	30.13
- Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	-	-	-
- Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO	-	-	-
- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	-	-	-
- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO	-	-	-
- Retribusi Kartu Perpustakaan-LO	-	-	-
- Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman-LO	-	-	-
- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi / Perlindungan Tanaman-LO	-	-	-
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO	-	-	-
- Retribusi Izin Trayek-LO	-	-	-
- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	-	-	-
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO	-	-	-

- Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Kesehatan-LO
-
- Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Diatas Air-LO
-
- Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO

-

- **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO**
Bila Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 117.450.000,00 atau sebesar 231,89 %.

-

- **Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO**
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO

-

- **Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO**
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO

-

- **Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO**
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO

-

- **Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO**
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga-LO

-

- **Retribusi Kartu Perpustakaan-LO**
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Kartu Perpustakaan-LO

-

- **Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman-LO**
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman-LO

-

- Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi /Perlindungan Tanaman-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Penggunaan Sarana Proteksi /Perlindungan Tanaman-LO
-
- Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Jasa Teknis Pengujian dan Kalibrasi-LO
-
- Retribusi Izin Trayek-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Izin Trayek-LO
-
- Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO
-
- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 tidak memperoleh Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada TKA-LO
-

5.1.3.3 Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga mengelola pencatatan Lain-Lain PAD yang sah-LO. Lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Adapaun rincian Lain-Lain PAD yang Sah-LO dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.4 Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2023 sebesar Rp. 408.560.050.349 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 255.303.932.631,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp.

153.256.117.718 Atau 60,03 %. Rincian Beban LO tahun 2023 komparasian dengan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	408.560.050.349	255.303.932.631	60,03
Beban Operasional	408.547.787.821	224.362.849.193	82,07
- Beban Pegawai	100.268.558.342	97.419.522.602	2,92
- Beban Persediaan	96.211.523.211	26.710.729.317	260,20
- Beban Jasa	50.333.414.757	30.618.820.789	64,39
- Beban Pemeliharaan	26.078.411.977	8.993.594.248	189,97
- Beban Perjalanan Dinas	135.028.820.584	60.542.996.237	123,03
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	627.058.950	77.186.000	712,40
- Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	12.262.528	-	100,00

5.1.4.1 Beban Operasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 menanggung beban operasi sebesar Rp. 408.547.787.821,00 Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 224.362.849.193,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 184.184.938.627,00 Atau 82,09 %. Rincian Beban Operasi tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan/penurunan sebesar Rp. 2.849.035.740 atau sebesar 2,92 %, hal ini disebabkan antara lain disebabkan oleh pegawai pensiun dan meninggal dunia.

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang

opersional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 69.500.793.893,00 atau sebesar 260,20 %.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 19.714.593.968,00 atau sebesar 64,39 %.

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 17.084.817.729,00 atau sebesar 189,97 %.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan/ penurunan sebesar Rp. 74.485.824.347,00 atau sebesar 122,94 %.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 maka terjadi kenaikan sebesar Rp. 12.262.528,00 atau sebesar 100 %, hal ini disebabkan antara lain adanya belanja modal aset tidak berwujud

5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Beban Penyisihan Piutang.

5.1.5. Aset

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset sebesar Rp. 406.293.841.968,26 pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu

yaitu sebesar Rp. 274.122.579.320,86 maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 132.228.354.581,40 atau 48,22 %. Rincian pendapatan aset tahun 2023 beserta komparasian dengan tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Uraian	2023	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	406.293.841.968,26	274.122.579.320,86	48,22
Aset Lancar	-	-	-
- Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-	-
- Kas di BLUD	-	-	-
- Kas Lainnya	-	-	-
- Piutang Pajak	-	-	-
- Piutang Bukan Pajak	-	-	-
- Piutang Retribusi	-	-	-
- Piutang Lainnya	-	-	-
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
- Persediaan	-	593.770.639,00	100
- Belanja dibayar dimuka	-	-	-
Aset Non lancar	406.293.841.968,26	273.528.808.681,86	48,53
- Investasi Jangka Panjang	-	-	-
- Aset Tetap	403.283.317.426,19	270.591.765.577,86	49,03
- Aset Lainnya	3.010.524.542,07	2.937.043.104,00	2.5

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar sebesar Rp 0,00 Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 593.770.639,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 593.770.639,00 Atau 100 %. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2023 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2022 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2023, sehingga tidak terdapat sisa uang Kas di Bendahara Pengeluaran. Sesuai amanah Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.I/16598-IV/BPKAD tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2023 dan Awal Tahun Anggaran 2024 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 , bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 31 Desember 2023. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Pengeluaran tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2022 yang lalu.

5.1.5.1.3. Kas di BLUD

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2005, pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) harus ditujukan dan mampu meningkatkan layanan kepada masyarakat. Badan Layanan Umum Daerah merupakan unit pemerintah yang memiliki fleksibilitas, di mana pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan tidak perlu disetor ke kas daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kas di BLUD.

5.1.5.1.4. Kas Lainnya

Rekening kas lainnya merupakan rekening kas yang dipergunakan untuk menyajikan nilai kas di sekolah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kas Lainnya.

5.1.5.1.5. Piutang Pajak

Piutang pajak merupakan tunggakan pungutan pajak yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Piutang Pajak.

5.1.5.1.6. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Piutang Retribusi

5.1.5.1.7. Piutang Lainnya

Piutang lainnya merupakan tunggakan pungutan diluar pajak dan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Piutang lainnya.

5.1.5.1.8. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2023 sebesar Rp. 104.140.000,00 bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tak tertagih tahun lalu yaitu sebesar Rp. 104.140.000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.1.9. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 0,00 bila dibandingkan dengan persediaan lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 593.770.639,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 593.770.639,00 atau 100 %.

5.1.5.1.10. Belanja dibayar dimuka

Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak membayar beberapa jasa atau fasilitas yang masa manfaatnya sampai dengan tahun 2023.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp 406.293.841.968,26 Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 270.591.765.577,86 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 132.765.033.286,40 Atau 48,53 %. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar sebesar Rp 403.283.317.426,19. Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu sebesar Rp. 270.591.765.577,86 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 132.691.551.848,33 Atau 49,03 %. Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Uraian	2023	Bertambah	Berkurang	2022	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-2/3)
Aset Tetap	403.283.317.426,19	132.691.551.848,33	-	270.591.765.577,86	49,03
Tanah	32.526.077.872,17	0,00	-	32.526.077.872,17	100
Peralatan dan Mesin	370.262.451.013,34	93.411.747.228,00	-	276.850.703.785,34	33,74
Gedung dan bangunan	149.144.772.604,62	26.451.957.925,00	-	122.692.814.679,62	21,55
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15.698.788.041,06	6.718.709.266,33	-	8.980.078.774,73	74,81
Aset Tetap Lainnya	4.619.677.177,00	0,00	-	4.619.677.177,00	100
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.877.155.244,00	6.109.137.429,00	-	768.017.815,00	795,44
Akumulasi Penyusutan	-175.845.604.526,00	0,00	-	-175.845.604.526,00	100

5.1.5.2.1.1. Tanah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah sebesar Rp 32.526.077.872,17. Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu sebesar Rp. 32.526.077.872,17 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan atau penurunan.

5.1.5.2.1.2. Peralatan dan Mesin

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin sebesar Rp 370.262.451.013,34. Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu sebesar Rp. 276.850.703.785,34 maka dapat diketahui terdapat kenaikan penurunan sebesar Rp. 93.411.747.228,00 Atau 33,74 %. Perubahan nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

Belanja Modal	: Rp.	96.493.091.949,00
Reklasifikasi antar asset	: Rp.	489.644.000,00
Koreksi	: Rp.	3.959.960.811,00

Pengurangan

Belanja Modal Tidak Menjadi Aset Tetap	: Rp.	2.185.602.120,00
Reklasifikas antar asset	: Rp.	1.305.683.771,00
Nilai dibawah kapitalisasi	: Rp.	95.092.830,00
Koreksi	: Rp.	3.941.470.811,00
Hapus Aset	: Rp.	3.100.000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp. 1.500.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya sebesar Rp. 1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable). Per 31 Desember 2023 nilai peralatan dan mesin yang termasuk dalam extracountable sebesar Rp. 1.659.883.453,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin extracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. Rp. 131.151.412,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 1.528.732.041,00 atau 8,57 %.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan sebesar Rp 149.144.772.604,62 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 122.692.814.679,62 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 26.451.957.925,00 Atau 21,55 %. Perubahan nilai gedung dan bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp.	31.861.013.740,00
- Reklasifikasi antar asset	: Rp.	1.236.245.245,00
- Koreksi	: Rp.	4.494.316.151,00

Pengurangan

- Belanja Modal tidak menjadi asset tetap	: Rp.	63.918.150,00
- Hapus Aset	: Rp.	4.278.000,00
- Reklasifikasi antar asset	: Rp.	6.577.104.910,00
- Koreksi	: Rp.	4.494.316.151,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2023 nilai gedung dan bangunan yang termasuk dalam ekstracountable sebesar Rp. 0,00 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan ekstracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp. 19.000.000,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan.

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 15.698.788.041,06 Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 8.980.078.774,73 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.718.709.266,33 Atau 74.81 %. Perubahan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut

Penambahan

- Belanja Modal	: Rp.	6.129.220.451,00
- Reklasifikasi antar asset	: Rp.	2.417.934.022,00
- Koreksi	: Rp.	3.510.065.500,00

Pengurangan

- Reklasifikasi antar asset	: Rp.	763.646.500,00
- Hapus	: Rp.	323.555.706,67
- Belanja modal tidak menjadi asset tetap	: Rp.	741.243.000,00
- Koreksi	: Rp.	3.510.065.500,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tidak memiliki nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk dalam ekstracountable

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 4.619.677.177,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 4.619.677.177,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 6.877.155.244,00. Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 768.017.815,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 6.109.137.429,00 atau 795,44%. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

Penambahan

- Reklasifikasi antar aset : Rp. 6.649.452.086,00

Pengurangan

- Reklasifikasi antar aset : Rp. 540.314.657,00

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomis aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2023 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 175.845.604.526,00. Adapun rincian obyek akumulasi penyusutan disajikan dalam tabel berikut:

Uraian	2021	2020	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
Akumulasi Penyusutan	175.845.604.526,00	175.845.604.526,00	0
- Peralatan dan Mesin	-	-	-
- Gedung dan Bangunan	-	-	-
- Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	-	-
- Aset Tetap Lainnya	-	-	-

Bila dibandingkan dengan Akumulasi penyusutan tahun lalu yaitu sebesar Rp. 175.845.604.526,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya sebesar Rp 3.010.524.542,07. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu sebesar Rp. 2.937.043.104,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 73.481.438,07 Atau 2,5 %. Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang dibatasi penggunaannya adalah kas yang hanya dapat digunakan untuk suatu tujuan tertentu atau dapat berubah menjadi kas (aset lancar) bila persyaratannya telah terpenuhi. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kas yang dibatasi penggunaannya.

5.1.5.2.2.2. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan Aplikasi. Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 326.533.967,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tidak Berwujud tahun lalu yaitu sebesar Rp. 240.790.000,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan sebesar Rp. 85.743.967,00 Atau 35,60 %. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya belanja Software.

5.1.5.2.2.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Aset Rusak Berat

Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat sebesar Rp. 1.755.073.104,00. Bila dibandingkan dengan Aset Rusak Berat tahun lalu yaitu sebesar Rp. 1.755.073.104,00, maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan.

- Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah

Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp. 1.181.970.000,00. Bila dibandingkan dengan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp. 1.181.970.000,00, maka tidak terdapat kenaikan/ penurunan.

- Kredit Bibit Bergulir

Pada tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki Kredit Bibit Bergulir.

- Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

Rekening ini merupakan akumulasi penyusutan atas aset-aset dalam kondisi rusak berat. Pada akhir tahun 2023 tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp. 23.529.444,00 per 31 Desember 2023. Pada akhir tahun 2023 terdapat kewajiban sebesar Rp. 23.529.444,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 41.843.007,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp. 18.313.563,00 atau 43,76 %. Penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan bahwa telah terbayar nya tagihan:

5.1.6.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki kewajiban jangka pendek.

5.1.6.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima pembayarannya namun jasa atau barang belum diberikan ke masyarakat atau pihak lain. Pada akhir tahun 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat Pendapatan Diterima Dimuka.

5.1.6.3. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2021 terdapat Utang beban sebesar Rp. 23.529.444,00. Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu sebesar Rp. 41.843.007,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan/penurunan

sebesar Rp. 18.313.563,00 atau 43,76 %. penurunan tersebut disebabkan oleh sudah tebayarnya tagihan.

5.1.7 Ekuitas

Kekayaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 406.270.312.524,26 Nilai ini secara matematikatis merupakan selih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2023 terdapat ekuitas sebesar Rp. 406.270.312.524,26 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu sebesar Rp. 274.080.736.313,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan sebesar Rp. 132.189.576.210,40 atau 48,23 %.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Kesuma Bangsa Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Sungai Pinang Kota Samarinda Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD tersebut beralamat sebagai berikut:

- UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki wilayah/cakupan kerja yang meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kantor beralamat di Jl. Biola Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Dadi Mulya kota Samarinda.

- UPTD KPHP Berau Barat.

UPTD KPHP Berau Barat dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 786.021 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 234.305 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 431.506 Ha; dan Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 114,210 Ha. Secara cakupan administrasi pemerintahan UPTD KPHP Berau Barat terletak dalam 4 wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dari 13 wilayah kecamatan di kabupaten Berau. Kantor beralamat di Jln. Pemuda no. 22 kode pos 77311 Kab. Berau Kalimantan Timur

- UPTD KPHP Bongan

UPTD KPHP Bongan dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 335.745,59 Ha. Secara administrasi pemerintahan terletak dalam 3 wilayah Kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Uatara dan Kabupaten Paser. Wilayah kerja KPHP Bongan berada pada 7 Kecamatan dan 26 desa/kampung. Kantor teletak Jl. Ahmad Yani No 1, Kel Klandasan Ilir, Balikpapan.

- UPTD KPHP Meratus

UPTD KPHP Bongan dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah penetapan Wilayah KPHP Meratus lintas 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabuaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten

Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang luasnya 387.488 ha. Dengan terbitnya SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Luas KPHP Meratus berdasarkan hasil tata batas adalah 368.955 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 1.371,70 ha; Hutan Produksi (HP) seluas 252.931,15 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 113.277,24 ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.374,41 ha. Kantor beralamat Jl. Marsma R Iswahyudi KM 10 Balikpapan.

- UPTD KPHP Kendilo

UPTD KPHP Kendilo dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi Kawasan Hutan Das Sungai Kendilo dan Telake beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM. 1 No. 09 Tanah Grogot Kabupaten Paser.

- UPTD KPHP Santan

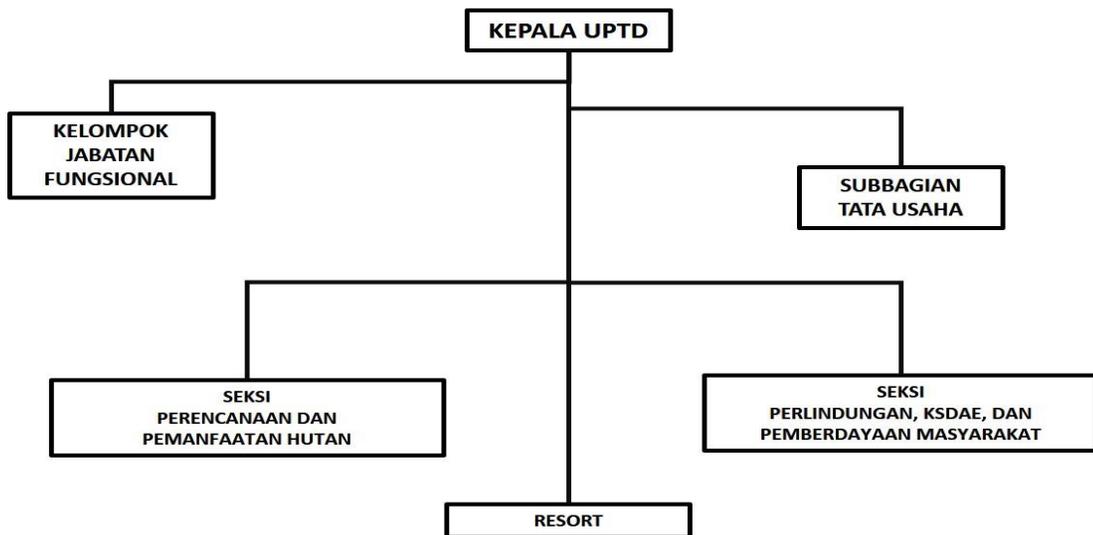
UPTD KPHP Santan Luas dengan wilayah/ cakupan kerja didasarkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 1 Desember 2011 yaitu seluas 270.557 Ha. Kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan peta perkembangan tata batas oleh BPKH wilayah IV Samarinda, sehingga Luas KPHP Santan adalah 267.068 Ha. Kantor beralamat Jl. Bangries No. 03 Samarinda 75125.

- UPTD KPHP Das Belayan

Penetapan Wilayah KPHP Sub DAS Belayan Sebagai KPH oleh Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur. KPHP Sub DAS Belayan mempunyai luas 1.033.151 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung ± 209.813,72 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 531.382,49 Ha; Hutan Produksi Tetap (HP) ± 272.938,59 Ha; dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ± 19.016,19 Ha. Kantor beralamat MT Haryono No. 30 Samarinda.

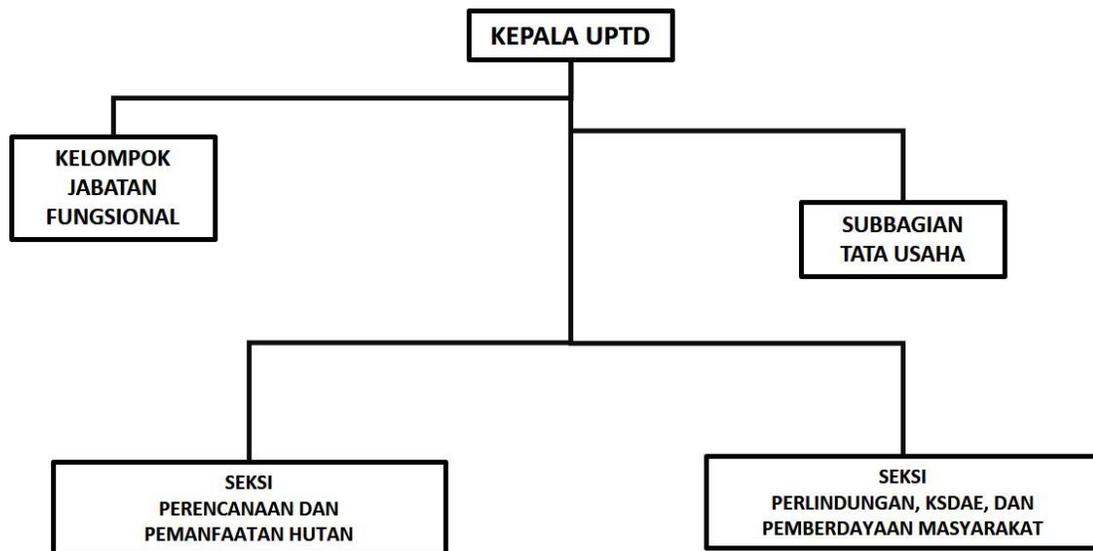
- UPTD KPHP Bengalon
UPTD KPHP Bengalon dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.
- UPTD KPHP Batu Ayau
UPTD KPHP Batu Ayau beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat.
- UPTD KPHP Batu Rook
UPTD KPHP Batu Rook beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat
- UPTD KPHP Berau Utara
UPTD KPHP Berau Utara beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- UPTD KPHP Berau Tengah
UPTD KPHP Berau Tengah beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- UPTD KPHP Berau Pantai
UPTD KPHP Berau Pantai beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
- UPTD KPHP Manubar
UPTD KPHP Manubar dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.
- UPTD KPHP Kelinjau
UPTD KPHP Kelinjau dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabuapten Kutai Timur Sangatta.
- UPTD KPHP Delta Mahakam
UPTD KPHP Delta Mahakam beralamat di Jl. MT. Haryono No. 30 Samarinda.
- UPTD KPHP Damai

Sementara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, tidak ada perbedaan struktur organisasi untuk keseluruhan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha serta Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun demikian, mempertimbangkan luas wilayah kelola UPTD KPH, maka jika dibutuhkan dapat dibentuk resort-resort untuk efektivitas kegiatan di lapangan, yang pelaksanaannya terdiri atas tenaga non struktural (Gambar II-2).



Gambar II-2. Struktur Organisasi UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Sedikit berbeda dengan struktur organisasi KPH, UPTD Tahura Bukit Soeharto tidak dilengkapi dengan resort-resort. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto hanya dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi Pendukung yakni Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), dan Pemberdayaan Masyarakat (Gambar II-3).



Gambar II-3. Struktur Organisasi UPTD Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2. Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

- Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
 - Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah tugas pokok secara struktural dijalankan oleh 12 Seksi yang

berada dalam 4 Bidang, serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih detail, tugas pokok unit-unit kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bertugas: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), serta pemanfaatan hutan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi penatagunaan hutan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH, dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumberdaya hutan provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.

b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di wilayah provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin penggunaan kawasan untuk kepentingan non kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam pemberian pertimbangan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi.
- c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak:
- Menyiapkan bahan dalam penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan data dan bahan dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran administratif usaha bidang kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penerapan sanksi administratif pelanggaran usaha kehutanan;

2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya bertugas: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi, pelaksanaan perlindungan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP); (3) perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas Kabupaten/Kota; (4) perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; (5) pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan.

b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya:

- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada pada lintas daerah Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan dalam pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk *Appendix* CITES;
- Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai konservasi tinggi, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam,

serta pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi;

- Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan (3) melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) urusan kehutanan. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas-tugas yang dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai:

- Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS.

b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
- Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/ pesisir;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
 - Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.
- c. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi;
 - Menyiapkan bahan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi.
4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.
- Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, dan promosi mitigasi iklim. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Penyuluhan Kehutanan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;

- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam promosi upaya mitigasi iklim urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan:
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam provinsi;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam provinsi.
- c. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat:
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
 - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.
5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
- Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan/atau lindung (KPHL). Kepala UPTD KPH membawahi 2 (dua) seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:
- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi dan/atau hutan lindung.
- b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung.
6. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Kaltim dalam penataan dan pengelolaan kawasan Tahura Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto membawahi 2 (dua) Seksi dengan tugas sebagai berikut:

- a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya.
- b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:
- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan taman hutan raya.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi; pengolahan

- hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;
3. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di provinsi, meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
 5. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
 6. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
 7. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.
- Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam fungsi masing-masing Bidang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kaltim No. 69 Tahun 2016, serta fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tahura Bukit Soeharto sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016 dengan penjabaran fungsi dimaksud sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Guna menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;

- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
 - d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi pada wilayah provinsi;
 - e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah provinsi;
 - f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
 - g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
 - h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
 - i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan dalam wilayah provinsi;
 - j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - k. Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya

Guna menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam);
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di provinsi.

3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Guna menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, sumber

daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan di dalam provinsi;

- d. Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
- e. Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Guna melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, kemitraan kehutanan dalam provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- e. Melaksanakan promosi upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Guna melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayahnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
- e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;

- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
- h. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
- i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan pengelolaan hutan;
- l. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPTD Tahura Bukit Soeharto

Guna melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, UPTD Tahura Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan dan pengelolaan Tahura;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Tugas pokok UPTD Tahura Bukit Soeharto yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019

tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Berau Barat

Tugas UPTD KPHP Berau Barat adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Berau Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bongon

Tugas UPTD KPHP Bongon adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Bongon selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Meratus

Tugas UPTD KPHP Meratus adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Meratus selalu

berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Kendilo

Tugas UPTD KPHP Kendilo adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Kendilo selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Santan.

Tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Das Belayan

Tugas UPTD KPHP Das Belayan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Das Belayan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bengalon

Tugas UPTD KPHP Bengalon adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101

Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Bengalon selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Batu Ayau

Tugas UPTD KPHP Batu Ayau adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHL Batu Rook

Tugas UPTD KPHP Batu Rook adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHP Berau Utara

Tugas UPTD KPHP Berau Utara adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Berau Tengah

Tugas UPTD KPHP Berau Tengah adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Berau Pantai

Tugas UPTD KPHP Berau Pantai adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Manubar

Tugas UPTD KPHP Manubar adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Kelinjau

Tugas UPTD KPHP Kelinjau adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHP Delta Mahakam

Tugas UPTD KPHP Delta Mahakam adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Damai

Tugas UPTD KPHP Damai adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

Tugas UPTD KPHP Mook Manor Bulatn adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Telake

Tugas UPTD KPHP Telake adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHL Balikpapan

Tugas UPTD KPHL Balikpapan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing

6.3. Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Jabatan	Pendidikan								
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DI	SMA	SMP	SD
Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kepala Bidang	-	24	1	-	-	-	-	-	-
Kepala Sub Bidang	-	24	37	-	-	-	-	-	-
JF/Penyetaraan Eselon IV	-	7	3	-	-	-	-	-	-

Jabatan	Pendidikan								
	S3	S2	S1	DIV	DIII	DI	SMA	SMP	SD
Staf	2	23	191	1	51	1	155	6	3
Jumlah	2	79	232	1	51	1	155	6	3

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, 23 Januari 2024
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur ,

H. JOKO ISTANTO,S.P.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750807 200003 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2023
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2023 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2023
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2023 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2023
Lampiran VIII	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga yang menghasilkan Pendapatan (jika ada)
Lampiran IX	Perjanjian Kerjasama dengan Pihak ketiga atau Kontrak Belanja yang menghasilkan Aset Tidak Berwujud (jika ada)
Lampiran X	Rekap tagihan Belanja tahun 2022 yang ditagih / dibayar tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XI	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Rekap Pendapatan-LO tahun 2023 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Penjualan Aset-Aset hasil lelang tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2023 dengan tanggal cetak diatas 31 desember 2023 dengan Validasi Bank
Lampiran XV	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2023 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Register Penutupan Kas akhir tahun 2023 (yang telah diotorisasi)

- Lampiran XVII Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XVIII Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XIX Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2023 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XX Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2023 (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXI Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2023 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
- Lampiran XXII Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2023 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
- Lampiran XXIII Rekap Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXIV Rincian Persediaan barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ke 3 jika ada (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXV Foto copy berita acara serah terima barang yang telah diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga tahun 2023
- Lampiran XXVI Rekapitulasi sewa dibayar dimuka/Asuransi dibayar dimuka (yang telah diotorisasi)
- Lampiran XXVII Laporan Mutasi Kontruksi dalam pengerjaan
- Lampiran XXVIII Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2023 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
- Lampiran XXIX Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)